

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar hukum, Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah

*Dasar
Hukum
dan Profil
Bawaslu
Jawa
Tengah*

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 /PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 022/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - l. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2023 tentang pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - m. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/Pl.09/K1/12/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - n. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023;
 - o. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 32/KU.02/SJ/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2023;
 - p. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Bawaslu Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686328/2023 Revisi ke-6 tanggal 18 Januari 2024.
1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah.
- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- a. Bawaslu Provinsi bertugas :
 - 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu.
 - 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. yang terdiri atas:

- a) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b) pemutakhiran data pemilih. penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h) penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i) pergerakan surat suara. berita acara penghitungan suara. dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - j) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan; dan
 - l) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi. yang terdiri atas:
- a) putusan DKPP;
 - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) putusan/keputusan Bawaslu. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) keputusan KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a. Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi
 - (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a. Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a. Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
- b. Bawaslu Provinsi berwenang:
 - 1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
 - 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
 - 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bawaslu Provinsi berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung

jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan

- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Kelas B. Bawaslu Jawa Tengah diklasifikasikan dalam Kelas A. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu
- c. Bagian Hukum. Hubungan antar Lembaga. dan Data dan Informasi; dan
- d. Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan No. 1. Gajahmungkur. Kec. Semarang Selatan. Kota Semarang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas”***. Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu. serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan. serta penyelesaian sengketa secara cepat. akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data. pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap. persediaan. dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib. efisien. ekonomis. efektif. transparan. dan bertanggung jawab. perlu diterapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi yang didukung dengan sistem SAKTI. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran. pelaksanaan. serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah. yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sehubungan

dengan implementasi SAKTI. maka per 1 Januari 2023 aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA sudah tidak digunakan lagi karena SAI sudah terintegrasi dalam SAKTI tersebut.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai pendekatan dalam menyusun laporan keuangan khususnya terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

(1) A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. terjadinya konsumsi aset. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang jangka panjang dan Aset Lainnya.

Aset

a. Aset Lancar.

Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga

disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian/Lembaga sesuai kodifikasi

Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
angka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau per-buatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset

Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan. Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 6 (Enam) kali dari DIPA awal. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Revisi DIPA

DIPA	PAGU	TANGGAL DIPA
DIPA AWAL	429.310.403.000	30 November 2022
DIPA REVISI 01	429.310.403.000	23 Desember 2022
DIPA REVISI 02	425.010.103.000	03 Juli 2023
DIPA REVISI 03	422.435.622.000	21 Juli 2023
DIPA REVISI 04	557.790.983.000	15 Desember 2023
DIPA REVISI 05	619.090.296.000	3 November 2023
DIPA REVISI 06	619.090.296.000	18 Januari 2024

Adapun rincian penjelasan revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 tersebut sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 tersebut di atas Revisi dilakukan pada tanggal Desember 2023 adalah revisi tingkat DJA yang merupakan revisi terkait *Automatic Adjustment* Belanja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 578/PR.03.01/K1/12/2023 tanggal 19 Desember 2022 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Revisi DIPA yang kedua merupakan revisi tingkat DJA Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) Pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan surat Ketua Bawaslu Nomor 1609.1/PR.03.01/K1/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN);
3. Revisi DIPA yang ketiga merupakan revisi tingkat DJA yang dilakukan pada bulan Juli 2023 sebagai bentuk tindak lanjut atas Surat Kementerian Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023;
4. Revisi DIPA yang keempat merupakan revisi atas penambahan anggaran dalam rangka memenuhi percepatan pembayaran Honorarium dan Operasional pengawas Ad-Hoc di Wilayah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 836/PR.03.01/JT/09/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Penyampaian RAB Bawaslu Kabupaten/Kota Revisi ke 4 Tahun Anggaran 2023;
5. Revisi DIPA ke lima tanggal 03 November 2023 Usulan Revisi Anggaran ke- 05 (Lima) pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meliputi Anggaran Belanja Tambahn (ABT) Tahap II untuk persiapan pelaksanaan rekrutmen pengawas ad-hoc tingkat TPS. kegiatan pada tahapan pengawasan masa kampanye pemilu. pengawasan logistic. pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. pemenuhan belanja operasional gaji pegawai. dan membuka pagu yang masih diblokir. Total tambahan anggaran ABT Tahap II adalah sebesar Rp 64.098.236.000.- dengan total pagu anggaran semula Rp 554.992.060.000.- menjadi Rp 619.090.296.000.

6. Revisi DIPA ke enam tanggal 18 Januari 2024 tingkat Kanwil Usulan Revisi Anggaran ke- 06 (Enam) tingkat Kanwil pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meliputi Pemutakhiran data hasil revisi POK dan Perubahan halaman IV-B DIPA. Pertimbangan dilakukan revisi adalah terdapat pagu minus belanja pegawai dikarenakan kekurangan tunjangan beras PPPK dan belanja barang dikarenakan perubahan akun paket *meeting* luar kota menjadi dalam kota. Total pagu anggaran tetap sebesar Rp 619.090.296.000.-.

Perubahan berdasarkan jenis belanja revisi anggaran awal dan setelah revisi DIPA terakhir pada periode pelaporan antara lain:

Tabel 2. Rincian Anggaran Semula – Menjadi

Belanja Barang	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai	27.656.898.000	35.742.514.000
Belanja Barang	398.773.005.000	575.128.974.000
Belanja Modal	2.880.500.000	8.218.808.000
Jumlah	429.310.403.000	619.090.296.000

Sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah belum mendapat anggaran dana hibah.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp379.385.331 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	379.385.331	100
Jumlah	0	379.385.331	100

Realisasi Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp379.385.331 dan Rp61.448.997 atau mengalami kenaikan sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	2023	2022	Naik (Turun)%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	12.190.639	0	100%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.780.000	20.790.270	(450%)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	353.464.692	14.658.728	96%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.950.000	5.000.000	50%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20.999.999	(100%)
Jumlah Belanja	379.385.331	61.448.997	84%

Selanjutnya Rincian Realisasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada tabel di atas sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp12.190.639 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Setor Bunga Bulan Februari 2023 Bawaslu Kab purworejo	10-Apr-23	E9D5B1JNFLLFV6EF	118.517
2	Setor Bunga Bulan Februari S.d April 2023 Bawaslu Kab Wonosobo	02-Mei-23	99D1E3CIFAQQFMJF	53.119
3	Setor Bunga Bulan Februari S.d Maret 2023 Bawaslu Kab Wonosobo	02-Mei-23	7F35E61QUQHVMNEO	136.259
4	Setor Bunga Giro Bulan Feb- Mar 2023 Bawaslu Kabupaten Pematang	11-Mei-23	42DF23CIFAT6O8CR	144.744

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
5	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Feb- April 2023 Bawaslu Kabupaten Pemalang	11-Mei-23	C4D680N9VR61H8US	23.866
6	Setor Bunga Giro Kecamatan Mei 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	05-Jun-23	FB5B38N3EAC6SJ9N	22.104
7	Setor Bunga Giro RDP Kabupaten Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Brebes	19/06/2023	72FF71JNFLRKA37H	188.977
8	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Juni 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	03/07/2023	B0B308N3EAF5GEN1	23.878
9	Setor Bunga Jasa Giro Kecamatan Feb - Juni 2023 Bawaslu Kota Semarang	18-Jul-23	B99128N3EAHJ08PB	36.666
10	Setor Bunga Giro Bawaslu Kota Semarang Feb - Mar 2023	18-Jul-23	30A293CIFB38I9H7	275.237
11	Setor Jasa Giro Kecamatan Bulan Juli Bawaslu Kab. Wonosobo	01-AUG-23	B760748VV5M7BBFK	23.720
12	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab kendal Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	3A3E648VV5OHLLNK	151.920
13	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Kendal Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	D402C6U8ELFMSL83	323.117
14	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Kebumen Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	F4D168N3EAKELNK7	5.680
15	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Kebumen Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	E2CF30N9VREV0N90	668.831
16	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Semarang dan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Semarang Bulan Januari s/d Juli 2023	'08-AUG-23	114920N9VREV4524	313.326

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
17	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Sragen Bulan Februari dan Maret 2023	'09-AUG-23	9A2DE0N9VRF07S0Q	138.583
18	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Maret s.d Juli 2023	'09-AUG-23	5A12E0N9VRF02508	317.806
19	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Magelang Bulan s.d Juli 2023	'09-AUG-23	4EEE72G4VGJP0750	37.542
20	Setor Bunga Giro Kecamatan se Banyumas Bulan Januari s.d Juni 2023	'09-AUG-23	F75DB1JNFM1CL8SD	99.153
21	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Salatiga Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	7A9DB61QUQTBNAE4	69.085
22	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kota Pekalongan dan Bawaslu Kota Pekalongan Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	5EB8C2G4VGJQ68CS	57.512
23	Setor Bunga Giro Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kudus Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	70CAE7QLUG22E37O	159.824
24	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Banjarnegara Bulan Januari sd Juli 2023	10-AUG-23	0A90555DF0AT1OAJ	55.103
25	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Tegal Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	9173055DF0AVA9NT	42.918
26	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Klaten Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	F2AB58N3EAKEP3AP	239.399
27	Setor Bunga Giro Bawaslu Kota Tegal dan Panwaslu Kecamatan se Kota Tegal Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	A5A0C2G4VGJO0K0O	37.414
28	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Grobogan dan Panwaslu Kecamatan se Kab Grobogan Bulan Februari Maret 2023	10-AUG-23	4C11648VV5OGQ2PS	307.968

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
29	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Grobogan dan Panwaslu Kecamatan Bulan Mei sd Juli 2023	10-AUG-23	101692G4VGJORN4S	42.755
30	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Banjarnegara Bulan Januari sd Juli 2023	10-AUG-23	'8B31155DF0AT1NUD	118.246
31	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Cilacap dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Cilacap Bulan Januari s.d. Juli 2023	10-AUG-23	B54126U8ELFN37AJ	265.797
32	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Pekalongan Bulan Januari sd Juni 2023	10-AUG-23	9207961QUQTAFO80	20.865
33	Setor Bunga Giro Kecamatan Tlogowungu dan Margoyoso Bulan Januari - Juli 2023	10-AUG-23	EAB8D1JNFM1BH7UV	4.766
34	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Blora dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Blora Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	E031848VV5OGP642	166.909
35	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta dan Bawaslu Kota Surakarta Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	5713A1JNFM1DP9FR	57.135
36	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kab Sukoharjo Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	F64DF8N3EAKH0OKN	37.864
37	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Demak Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	1FADB7QLUG25KG2G	15.903
38	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Matesin Kabupaten Karanganyar Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	C44AC7QLUG24JNUQ	7.648
39	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Rembang dan Panwaslu Kecamatan se Kab Rembang Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	C428F1JNFM1DMA3V	45.657

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
40	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Demak Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	3BA682G4VGJP07LI	53.404
41	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Jepara dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Jepara Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	79E050N9VRF06VK2	188.395
42	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kab Boyolali Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	486FE55DF0B0DBR3	23.815
43	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Klaten Bulan Januari s/d Juli 2023	14-AUG-23	5E87A3CIFB67JAMF	80.734
44	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Brebes Bulan Januari s/d Juli 2023	18-AUG-23	F3ACD6U8ELFVJP01	134.563
45	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Agustus Bawaslu Kab. Wonosobo	01-Sep-23	85BA961QUQU06U60	22.123
46	Setor Bunga jasa giro bulan agustus kab temanggung bulan Agustustus	11-Sep-23	CDA720N9VRHV4TI0	34.672
47	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Blora Bulan Agustus 2023	26-Sep-23	876B00N9VRIF437A	9.534
48	Bunga Jasa Giro Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2023	05/10/2023	7D2197QLUG7TPJEG	3.980.322
49	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Desember 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	31/10/2023	F90660N9VRL5GCC2	29.082
50	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan Desember 2023	20/10/2023	E4D830N9VRL9QJMA	11.349
51	Setor Bunga Giro Kecamatan Bawaslu Kab. Wonosobo Oktober 2023	16/10/2023	8F3183CIFBCPRNAN	30.521
52	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan Oktober 2023	28-DEC-23	DDF4B8N3EAU15AC1	26.988

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
53	Setor bunga giro kecamatan bulan November Kabupaten Wonosobo	29-DEC-23	BD6090N9VROINB7G	29.418
54	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan November 2023	29-DEC-23	2A75F61QUR9BRFAG	29.970
55	Setor Jasa Giro Kecamatan di Kab. Rembang Bulan Agustus 2023	30-DEC-23	2A1840N9VRR817DA	14.533
56	Setor Jasa Giro Kec. Rembang Nov Des 2023	29-DEC-23	138BD0N9VRR81G3O	7.990
57	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan Desember 2023	28-DEC-23	A458F1JNFMDRKGOD	28.941
58	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Pemalang Bulan Mei s.d Desember 2023	29-DEC-23	F7CCA6U8ELS62LK7	203.189
59	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Rembang Bulan Agustus - Desember 2023	28-DEC-23	B46228N3EB102KJV	37.130
60	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Semarang Bulan Juli s.d Desember 2023	29-DEC-23	5B3B13CIFBILJ9LN	67.932
61	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Brebes Bulan Agustus s.d Desember 2023	29-DEC-23	1E9FE7QLUGEJKB9E	259.828
62	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Demak Bulan Desember s.d Desember 2023	28-DEC-23	416692G4VH0965N4	20.444
63	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	30E6548VV650V08K	70.338
64	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Desember 2023	27-DEC-23	D4DE17QLUGEJKF4S	9.493

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
65	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Desember 2023	29-DEC-23	FE4E78N3EB101NMB	96.597
66	Setor Bunga Giro Kecamatan Tlogowungu dan Margoyoso Bawaslu Kab Pati Bulan Agustus - Desember 2023	13-DEC-23	8622D61QUR9QQI7I	29.036
67	Setor Bunga Giro Panwas Se Kecamatan di Kabupaten Klaten bulan Juli s.d Desember 2023	30-DEC-23	98EF82G4VH0AB5UO	285.425
68	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Kudus Bulan Desember s.d Desember 2023	21-DEC-23	C707B1JNFMDSRFS7	114.233
69	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Temanggung Bulan Desember s.d Desember 2023	29-DEC-23	F0D048N3EB103CAD	231.491
70	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar bulan Agustus s.d Desember 2023	21-DEC-23	C1D9E6U8ELS8BJR7	11.385
71	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	8257C3CIFBIMMUN5	13.776
72	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta bulan Agustus s.d Desember 2023	27-DEC-23	E36AE7QLUGEJN140	285.616
73	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Cilacap bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	CFB067QLUGEKO12K	314.545
74	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Magelang Bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	5823D8N3EB1142LH	92.581

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
75	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Tegal Bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	F70A10N9VRRHF24M	22.929
76	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Tegal Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	2100D3CIFBIMOD4P	210.554
77	Setor Jasa Giro kecamatan Bulan Desember 2023 bawaslu Kab. Tegal	30-DEC-23	1165E8N3EB1176MF	117.228
78	Setor Bunga Giro Panwas Se Kecamatan di Kota Salatiga bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	925C80N9VRRHHB8C	104.722
JUMLAH				12.190.639

- Selanjutnya, rincian realisasi pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.780.000 merupakan setor pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran tunjangan struktural yang telah disetorkan pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan nomor Dokumen /SP2D 0261301011054.
- Berikutnya rincian realisasi pendapatan penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu sebesar Rp353.464.692 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian Belanja Tahun Yang Lalu atas Catatan Inspektorat	15/02/2023	91EB76U8EKU0S2BJ	2.819.250
2	Pengembalian Belanja Tahun Yang Lalu atas Catatan Inspektorat	16/02/2023	9D7997QLUFGEBHTM	658.500
3	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	27/02/2023	0D7E40N9VQTLL5JS	1.200.000
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Bawaslu Prov. Jateng belanja pemeliharaan Kend. Bermotor	27/02/2023	28A4B55DEVPMABJ	3.771.342

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Bawaslu Prov Jateng Pekerjaan	27/02/2023	A36748N3EA35A01D	4.220.600
6	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	1A5CA6U8EKUDH6BD	1.920.000
7	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	053AA48VV578A61K	780.000
8	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	5B01D48VV578B4IQ	3.840.000
9	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	02F323CIFA KRTC07	1.275.000
10	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	BBFB148VV578B5P8	3.840.000
11	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	364B02G4VG2FHM8M	3.840.000
12	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	236586U8EKUDIAFL	3.840.000
13	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	12ABF61QUQC1501I	3.840.000
14	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	ADCA348VV578BBJG	3.840.000
15	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	094251JNFLI8R05H	3.840.000
16	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	10D857QLUFIVMM98	3.840.000
17	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	9AC3E1JNFLI8R0NB	3.840.000
18	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	FBF728N3EA5C3PIJ	2.880.000
19	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	ED6E83CIFAN1LTRJ	3.840.000
20	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	C3E143CIFA KRT8PN	1.365.000

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
21	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	F27182G4VG2FG90I	600.000
22	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	532506U8EL0JB7TV	3.840.000
23	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	AE1CE8N3EA5C3JIN	3.840.000
24	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	E708B55DEVPKN9UL	3.840.000
25	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	AFE7B7QLUFIVMK7U	2.880.000
26	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	10BE07QLUFIVQ93A	3.360.000
27	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	DE1291JNFLI8VRQF	3.840.000
28	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	C4D0261QUQE70RDG	3.840.000
29	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	53B3E6U8EL0JEGAJ	3.840.000
30	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	00C8D3CIFAN1PQ1B	3.840.000
31	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	DDEBB6U8EL0JD7AD	3.840.000
32	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	7A0ED0N9VQVSKQOQ	3.840.000
33	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	7F4163CIFAN1RUM7	3.840.000
34	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	286346U8EKUDIFKB	3.840.000
35	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	D972961QUQC1584U	3.840.000
36	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	B659F0N9VQVTLCH2	3.840.000

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
37	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	8D7033CIFAN1P8NT	3.840.000
38	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	E13A155DEVQRJPK9	3.840.000
39	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	4011F61QUQE84H2K	2.880.000
40	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	06/03/2023	243B90N9VQVSEQT4	3.840.000
41	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	06/03/2023	949FA7QLUFJ106NS	3.840.000
42	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	06/03/2023	2E0D53CIFAN5VDQB	3.840.000
43	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	06/03/2023	E4AE77QLUFJ0THNS	3.840.000
44	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	07/03/2023	78CAD6U8EL0OLRPT	2.880.000
45	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	07/03/2023	E11152G4VG4QLV18	3.400.000
46	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	07/03/2023	9217555DEVVRVSRSD	26.520.000
47	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	09/10/2023	B94088N3EAQEGEHR	2.707.500
48	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	10/10/2023	A807B48VV5UHKMGG	8.122.500
49	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	16/10/2023	A372A3CIFBC42867	5.415.000
50	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	20/10/2023	00F0F48VV5UO4BLG	10.830.000
51	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	24/10/2023	D4AA26U8ELM4RU39	5.415.000
52	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	25/10/2023	CD9258N3EAQTQJS5	2.707.500

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
53	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	25/10/2023	55A7D0N9VRLDVKRC	5.415.000
54	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	26/10/2023	5EC1E48VV5V0SU60	8.122.500
55	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	30/10/2023	C086A55DF0HHEIIB	16.245.000
56	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	30/10/2023	F54D00N9VRLJEGJE	5.415.000
57	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	30/10/2023	045CF48VV5V527NG	8.122.500
58	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	D344E1JNFM7VQHTJ	5.415.000
59	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	ABC4E61QUR3TUDS8	8.122.500
60	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	EBC0861QUR3V15KQ	8.122.500
61	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	6C3427QLUG8NR59A	2.707.500
62	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	B9CEF7QLUG8MMOAI	8.122.500
63	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	532B76U8ELMBE7L7	2.707.500
64	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	7EAAA7QLUG8NREAM	2.707.500
65	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	262B748VV5V6790S	5.415.000
66	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	A57BE1JNFM8109V3	3.000.000
67	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	01/11/2023	916673CIFBCPRMPH	8.122.500
68	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	01/11/2023	E49EC0N9VRLKJ7BK	8.122.500

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
69	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	01/11/2023	03C2E6U8ELMBFFLH	5.415.000
70	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	02/11/2023	6276D3CIFBCPQFBM	8.122.500
71	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	03/11/2023	9B84F8N3EAT8ANSR	5.415.000
72	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	03/11/2023	DD56461QUR633LP5	8.122.500
73	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	23/11/2023	D97CB3CIFBFE2SIR	5.122.500
74	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	04/12/2023	BCAF38N3EAU02ARB	5.415.000
JUMLAH				353.464.692

4. Rincian pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp9.950.000. pendapatan ini merupakan pendapatan yang timbul akibat catatan hasil temuan BPK pada pemeriksaan dana Hibah tahun 2009 dan tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten/Kota. pendapatan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Pendapatan Anggaran Lain-lain

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian Belanja Panwaskab. Wonogiri TA 2008	08/02/2023	984D61JNFLFDM8DF	500.000
2	Pengembalian Belanja Panwaskab Wonogiri TA 2008	11/05/2023	C175F0N9VR61G2VI	500.000
3	Pengem. Belanja Bawaslu Kab. Pekalongan TA 2018 (Pokja Kec. Wonopringgo)	12/05/2023	DFA891JNFLOH693H	1.450.000
4	Pengem. Belanja Bawaslu Kab. Pekalongan TA 2018 (Pokja Kec. Karangdadap)	12/05/2023	916C955DF022Q9M3	3.800.000
5	Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA 2008	15/05/2023	8DC961JNFLODT6MV	500.000
6	Pengembalian Belanja Panwaskab Klaten TA 2008	18/07/2023	3ED741JNFLUEN9OP	500.000
7	Pengembalian Belanja Panwaskab Wonogiri TA 2008	24/07/2023	D04708N3EAHUOA2L	200.000
8	Pengembalian Belanja Bawaslu Kec. Karanganyar Kabupaten Pekalongan TA 2018	24/07/2023	7ABF88N3EAHUO6AB	1.600.000
9	Pengembalian Belanja Panwaskab. Klaten TA 2008	29/08/2023	BA16A6U8ELG3PBE7	500.000

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
10	Pengembalian Belanja TA 2008 Panwaslu Kab. Wonogiri	19/09/2023	9C61161QUR0ETKCG	200.000
11	Pengembalian Belanja TA 2008 Panwaslu Kab. Wonogiri	28/12/2023	73C6248VV650UV7G	200.000
JUMLAH				9.950.000

B.2 Belanja

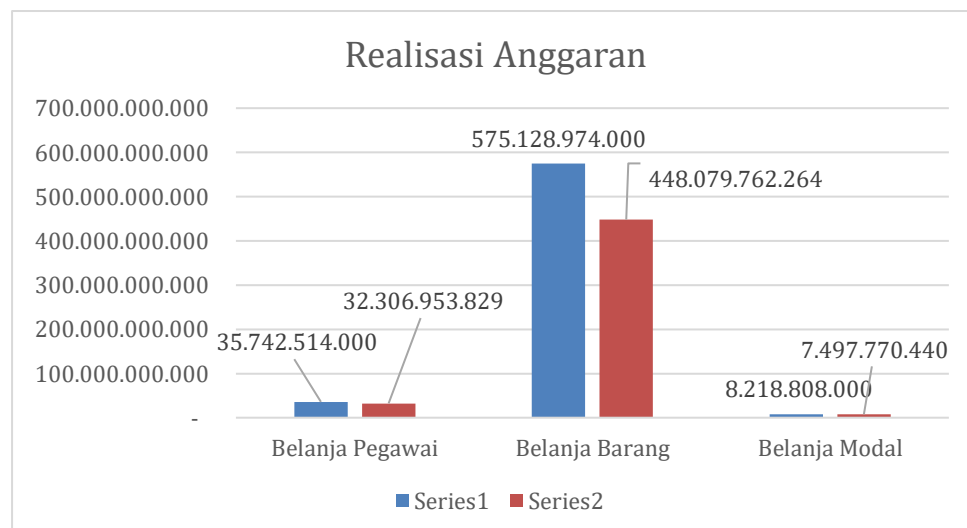
Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 487.884.486.533 atau 79 persen dari anggaran belanja sebesar Rp619.090.296.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	35.742.514.000	32.306.953.829	90%
Belanja Barang	575.128.974.000	448.079.762.264	78%
Belanja Modal	8.218.808.000	7.497.770.440	91%
Jumlah	619.090.296.000	487.884.486.533	79%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1
Realisasi Belanja



Selanjutnya, realisasi Belanja berdasarkan Program pada tahun 2023 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Realisasi Belanja Berdasarkan Program

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	BELANJA NETTO	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	4.270.802.000	2.488.502.497	58,27	1.782.299.503
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	111.134.101.000	78.498.104.209	72,45	32.635.996.791
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	180.000	0	0,	180.000
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	331.615.626.000	282.302.623.659	86,14	49.313.002.341
6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	32.547.458.000	17.671.516.866	56,06	14.875.941.134
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	445.549.000	367.464.843	82,47	78.084.157
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	1.143.653.000	952.426.850	83,28	191.226.150
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi	6.736.453.000	2.958.740.531	45,13	3.777.712.469

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	BELANJA NETTO	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
	Dan DPRD Kabupaten/Kota				
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	37.916.061.000	27.131.334.952	76,22	10.784.726.048
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	7.380.497.000	6.744.645.450	91,38	635.851.550
6848	Pengawasan Logistik	5.241.187.000	2.527.212.937	53,64	2.713.974.063
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CQ	538.431.567.000	421.642.572.794	79,81	116.788.994.206
WA	Program Dukungan Manajemen				
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	300.212.000	112.475.275	37,47	187.736.725
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	1.074.427.000	580.822.444	54,06	493.604.556
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	76.583.631.000	64.686.839.649	84,48	11.896.791.351
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	2.700.459.000	861.776.371	31,91	1.838.682.629
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	80.658.729.000	66.241.913.739	82,14	14.416.815.261
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	619.090.296.000	487.884.486.533	80,11	131.205.809.467

Selanjutnya. perbandingan Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Belanja Pegawai	32.306.953.829	30.673.264.345	5%
Belanja Barang	448.079.762.264	95.077.477.279	79%

Belanja Modal	7.497.770.440	1.207.734.814	84%
Jumlah	487.884.486.533	126.958.476.438	74%

Realisasi Belanja Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 74 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1 Pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sudah dimulai sejak awal tahun anggaran 2023 sedangkan pada 31 Desember 2022 belum;
- 2 Terdapat anggaran operasional Panwascam sedangkan tahun 2022 belum;
- 3 Meningkatnya belanja pegawai karena terdapat mutasi pegawai ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 4 Meningkatnya belanja barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan aset yang dimiliki agar tetap dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik;
- 5 Meningkatnya belanja modal untuk menambah sarana yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan operasional seperti laptop dan sarana humas serta penambahan renovasi gedung perkantoran guna meningkatkan kualitas pelayanan.

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp32.306.953.829 dan Rp30.673.264.345 atau terjadi kenaikan sebesar 5 (Lima) persen. Kenaikan belanja pegawai disebabkan oleh :

1. Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 (Tiga) Pegawai mutasi dari Bawaslu Provinsi Lain. Dengan adanya penambahan pegawai tersebut maka Jumlah PNS di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Desember semula 53 pegawai menjadi 54 pegawai.
2. Adanya penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang yang tersebar di Bawaslu Provinsi dan 4 (empat) Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil

Tabel 11. Rincian Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023

Keterangan	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.889.514.000	2.183.010.960		2.183.010.960	0,76
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.106.000	37.839	986	36.853	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	289.019.000	152.929.002		152.929.002	0,53
Belanja Tunj. Anak P	115.603.000	32.267.298		32.267.298	0,28
Belanja Tunj. Struktural PNS	233.380.000	182.800.000	1.080.000	181.720.000	0,78
Belanja Tunj. Fungsional PNS	80.245.000	74.799.000		74.799.000	0,93
Belanja Tunj. PPh PNS	257.080.000	168.304.103		168.304.103	0,65
Belanja Tunj. Beras PNS	198.830.000	128.110.980		128.110.980	0,64

Keterangan	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	%
Belanja Uang Makan PNS	693.132.000	350.444.000		350.444.000	0,51
Belanja Tunjangan Umum PNS	165.410.000	93.685.000		93.685.000	0,57
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	26.456.300.000	26.180.638.550	10.115.760	26.170.522.790	0,99
Belanja Gaji Pokok PPPK	469.077.000	179.638.400		179.638.400	0,38
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.466.000	1.196		1.196	0,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	49.023.000	8.726.480		8.726.480	0,18
Belanja Tunjangan Anak PPPK	29.414.000	2.168.848		2.168.848	0,07
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	83.630.000	28.600.000		28.600.000	0,34
Belanja Tunjangan Beras PPPK	23.970.000	9.849.120		9.849.120	0,41
Belanja Uang Makan PPPK	62.020.000	39.600.000		39.600.000	0,64
Belanja Uang Lembur	286.465.000	21.944.000		21.944.000	0,08
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.862.924.000	2.310.329.622		2.310.329.622	0,81
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	483.906.000	170.266.177		170.266.177	0,35
Total	35.742.514.000	32.318.150.575	11.196.746	32.306.953.829	0,90

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.306.953.829 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS Bulan Januari s.d. Desember 2023;
2. Pembayaran tunjangan struktural dan fungsional Bulan Januari s.d. Desember 2023;
3. Pembayaran uang makan PNS Bulan Januari s.d. Desember 2023;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Bulan Januari s.d. Desember 2023;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bulan Januari s.d. Desember 2023;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Januari s.d. Desember 2023;
7. Pembayaran THR PNS Tahun 2023;
8. Pembayaran Gaji Ketiga Belas PNS Tahun 2023;
9. Pembayaran THR Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; dan
10. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

11. Gaji dan Tunjangan PPPK;
12. Uang makan PPPK.

Selanjutnya penjelasan mengenai rincian pengembalian belanja pegawai sebesar Rp11.196.746 merupakan:

- a. Pembulatan Gaji PNS senilai Rp986;
- b. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS Rp1.080.000 sesuai dengan Bukti SPM Nomor 01862T/686328/2023 dan SP2D Nomor 230261301011054;
- c. Pengembalian Belanja Uang Kehormatan. Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas yang mengundurkan diri dari Bawaslu Rp10.115.760 dengan Nomor Bukti Penyetoran NTPN D5C161GAB71VUEVN dan NTB 946812366836 pada tanggal 16 Mei 2023.

Berikutnya perbandingan realisasi belanja pegawai periode 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.365.307.196	2.748.452.247	18%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	26.170.522.790	26.083.853.950	0,33%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	268.584.044	0	100%
Belanja Lembur	21.944.000	17.775.000	19%
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	2.480.595.799	1.823.183.148	27%
Total	32.306.953.829	30.673.264.345	5%

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp448.079.762.264 dan Rp 95.077.477.279. realisasi belanja barang pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar persen dari tahun sebelumnya kenaikan serta rincian belanja barang tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	29.222.060.495	44.375.309.391	-52%

Belanja Barang Non Operasional	283.555.903.914	9.606.556.739	97%
Belanja Barang Persediaan	26.818.000	48.653.117	-81%
Belanja Jasa	40.920.802.485	9.358.036.186	77%
Belanja Pemeliharaan	3.939.695.620	3.030.366.079	23%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	90.414.481.750	28.658.555.767	68%
Total	448.079.762.264	95.077.477.279	79%

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 79 persen dari tahun sebelumnya. hal ini yang disebabkan:

- 1 Meningkatnya belanja barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan aset yang dimiliki agar tetap dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik;
- 2 Pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sudah dimulai sejak awal tahun anggaran 2023 sedangkan pada tahun 2022 belum;
- 3 Terdapat anggaran operasional Panwascam sedangkan tahun 2022 belum.

Saldo sebesar Rp448.079.762.264 digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan untuk:

1. Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Pengawasan Pemilu Partisipatif Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi;
11. Pengelolaan Kehumasan. Peliputan. dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, penjelasan mengenai realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Keterangan	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	%
Belanja Keperluan Perkantoran	30.823.000.000	27.804.129.021	713.464.077	27.090.664.944	0,88
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	214.742.000	18.006.101	0	18.006.101	0,08
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2.088.959.000	1.655.394.000	0	1.655.394.000	0,79
Belanja Barang Operasional Lainnya	479.400.000	457.995.450	0	457.995.450	0,96
Belanja Bahan	71.256.128.000	58.234.476.284	2.257.400.826	55.977.075.458	0,79
Belanja Honor Output Kegiatan	228.337.080.000	225.487.530.000	281.200.000	225.206.330.000	0,99
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.748.200.000	2.372.498.456	0	2.372.498.456	0,31
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38.250.000	26.818.000	0	26.818.000	0,70
Belanja Langganan Listrik	3.812.900.000	2.265.826.366	622.668.940	1.643.157.426	0,43
Belanja Langganan Telepon	2.564.400.000	65.607.299	28.329.285	37.278.014	0,01
Belanja Langganan Air	1.622.802.000	227.233.898	69.947.542	157.286.356	0,10
Belanja Jasa Konsultan	50.000.000	47.341.500	0	47.341.500	0,95
Belanja Sewa	67.841.200.000	34.818.854.489	1.063.312.000	33.755.542.489	0,50
Belanja Jasa Profesi	6.100.100.000	3.719.100.000	2.125.000	3.716.975.000	0,61
Belanja Jasa Lainnya	2.260.678.000	1.563.371.700	150.000	1.563.221.700	0,69
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.303.327.000	2.902.613.841	386.637.860	2.515.975.981	0,47

Keterangan	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	20.000.000	13.375.000	0	13.375.000	0,67
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.727.335.000	1.410.344.639	0	1.410.344.639	0,38
Belanja Perjalanan Biasa	40.947.879.000	24.476.686.784	0	24.476.686.784	0,60
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.355.248.000	44.259.838.600	2.460.695.070	41.799.143.530	0,59
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.413.397.000	20.842.524.142	188.794.200	20.653.729.942	0,81
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.123.949.000	3.484.921.494	0	3.484.921.494	0,85
Jumlah	575.128.974.000	456.154.487.064	8.074.724.800	448.079.762.264	0,78

Pada akhir Periode tanggal 31 Desember 2023 terdapat pengembalian sisa LS RDP dari Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar Rp8.074.724.800 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Pengembalian Sisa LS RDP

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembalian	NTPN	Bank
Kabupaten Banjarnegara	215.578.463	11AA62CPNKE26Q96	BRI
Kabupaten Banyumas	339.194.713	22AB56QT6P9MM5UD	BRI
Kabupaten Batang	167.796.769	877BD7NAMJRPHFJE	BRI
Kabupaten Blora	208.778.492	F4CD60JUNV8VR0UQ	BRI
Kabupaten Boyolali	232.669.057	A263F3977F0EK3GR	BRI
Kabupaten Brebes	1.055.674.624	C8AA25UFMUNA9BME	BRI
Kabupaten Cilacap	448.928.325	60F878JO6EEFG44V	BRI
Kabupaten Demak	154.749.780	8A96145KN9IHEVGM	BRI
Kabupaten Grobogan	118.005.783	4103F2CPNKE26NM2	BRI
Kabupaten Jepara	160.640.100	E429D1GC7PR2MGI5	BRI
Kabupaten Karanganyar	70.189.684	F5E830JUNV99D2GI	BRI
Kabupaten Kebumen	766.953.221	6F9902CPNKDOKSQ2	BRI
Kabupaten Kendal	413.559.827	8E0227NAMJS33B5K	BRI
Kabupaten Klaten	97.467.719	B4CC32CPNKDOL6S8	BRI
Kabupaten Kudus	200.630.573	6659B3977F051S0P	BRI
Kabupaten Magelang	202.729.040	7DFDE45KN9I7TDUQ	BRI
Kabupaten Pati	119.856.945	8B57F8JO6EE5UG8D	BRI
Kabupaten Pekalongan	164.619.938	07F811GC7PRC88MB	BRI
Kabupaten Pemalang	321.042.425	E439C8JO6EEP1O5T	BRI
Kabupaten Purbalingga	171.921.760	400D02CPNKDOL7S4	BRI

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembalian	NTPN	Bank
Kabupaten Purworejo	150.157.895	59E20522744KAGER	BRI
Kabupaten Rembang	66.022.141	686695UFMUNA8R1K	BRI
Kabupaten Semarang	340.168.709	057568JO6EEP1SHT	BRI
Kabupaten Sragen	109.096.346	42E316QT6P9D4EK5	BRI
Kabupaten Sukoharjo	108.945.216	2FD257NAMJRPHTO	BRI
Kabupaten Tegal	382.257.359	F34420JUNV99D82M	BPD JAWA TENGAH
Kabupaten Temanggung	326.677.502	E0CA10JUNV8VR3R0	BRI
Kabupaten Wonogiri	119.256.050	351705UFMUN0NE9Q	BRI
Kabupaten Wonosobo	194.241.120	28E051GC7PRC88F5	BRI
Kota Magelang	173.725.200	5104A8JO6EE5UF9P	BRI
Kota Pekalongan	35.862.450	9B4213977F051TK1	BRI
Kota Salatiga	131.411.681	5BB390JUNV99D7S4	POS INDONESIA
Kota Semarang	243.270.065	119665UFMUNJQN6S	BRI
Kota Surakarta	23.188.175	C7CF76QT6PA07TN1	BRI
Kota Tegal	39.457.653	7798E5UFMUNJQOH2	POS INDONESIA
Jumlah	8.074.724.800		

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.497.770.440 dan Rp1.207.734.814. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Adapun perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2023 dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.944.500.000	7.272.265.000	91,54%	672.235.000
Belanja Modal Lainnya	274.308.000	225.505.440	82,21%	48.802.560
Jumlah	8.218.808.000	7.497.770.440	91,23%	721.037.560

Realisasi Belanja Modal pada Per 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 84 persen dibandingkan tahun lalu. Belanja modal yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

terutama dalam bidang kehumasan pada tahun 2023. Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.272.265.000	1.147.784.814	84%
Belanja Modal Lainnya	225.505.440	59.950.000	73%
Jumlah	7.497.770.440	1.207.734.814	84%

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp7.497.770.440 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp7.272.265.000 dan Belanja Modal Lainnya Rp225.505.440 Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp7.272.265.000:
 - a. Belanja Modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Senilai Rp73.975.000 Dengan Nomor SP2D 230261701000219;
 - b. Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor 67/PL.10/JT/03/2023 Tanggal 17 Maret 2023. BAST Nomor 037/PL.10.00/JT/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023. BAP Nomor 033/PL.10.01/JT/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Senilai Rp1.139.250.000 Dengan Nomor SP2D 230261302003245;
 - c. Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor 077/PL.10/JT/04/2023 Tanggal 10 April 2023. BAST Nomor 035/PL.10.00/JT/04/2023 Tanggal 28 April 2023. BAP Nomor 031/PL.10.01/JT/04/2023 Tanggal 28 April 2023 Senilai Rp528.000.000 Dengan Nomor SP2D 230261302003244;
 - d. Belanja Modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Senilai Rp108.640.000 Dengan Nomor SP2D 230261701000099.
 - e. Belanja Modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senilai Rp44.970.000 Dengan Nomor SP2D 230261701001885
 - f. Belanja Modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senilai Rp29.835.000 Dengan Nomor SP2D 230261701001592
 - g. Belanja Modal Laptop Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senilai Rp199.920.000 Dengan Nomor SP2D 230261701000933
 - h. Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor 188/PL.10/JT/09/2023 Tanggal 26 September 2023, BAST Nomor 126/PL.10.00/JT/11/2023 Tanggal 25 November 2023, BAP Nomor 120/PL.10.01/JT/11/2023 Tanggal 27 November 2023 Senilai Rp520.625.000 Dengan Nomor SP2D 230261303023632
 - i. Belanja Modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senilai Rp21.709.670 Dengan Nomor SP2D 230261701000793
 - j. Belanja Modal Sesuai Kontrak No. 190/PL.10/JT/09/2023 Tanggal 26 September 2023, BAST No. 085/PL.10.00/JT/10/2023 Tanggal 20 Oktober 2023, BAP No. 081/PL.10.01/JT/10/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Senilai Rp4.609.000.000 Dengan Nomor SP2D 230261302009522.
2. Belanja Belanja Modal Lainnya senilai Rp225.505.440:

- a. Belanja Modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Senilai Rp49.835.000 Dengan Nomor SP2D 230261701000207;
- b. Belanja Modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senilai Rp129.950.000 Dengan Nomor SP2D 230261701000339.
- c. Belanja Modal Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah senilai Rp2.560.770 Dengan Nomor SP2D 230261301018211
- d. Belanja Modal Software senilai Rp39.500.000 Dengan Nomor SP2D 230261701000933

Selanjutnya rincian belanja modal pada uraian diatas dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022

Nomor	Keterangan	Jumlah (Buah)	Nilai (Rp)
1	LCD Projector/Infocus Buah	35	486.500.000
2	CCTV - Camera Control Television System	35	435.750.000
3	A.C. Split	6	74.805.000
4	Stabilisator	1	6.700.000
5	Tripod Camera	2	2.840.000
6	Lensa Kamera	4	57.700.000
7	Camera Digital	1	56.800.000
8	Video Conference	1	18.050.000
9	Clipp On	2	9.800.000
10	Lap Top	243	4.717.420.000
11	Hard Disk	1	5.000.000
12	Monitor CCTV	35	84.875.000
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	35	133.000.000
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	71	1.155.525.000
15	External/ Portable Hardisk	4	27.500.000
16	Aset Tetap Renovasi (Demak & Sukoharjo) Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2	179.785.000
17	Software (Website Adjudikasi Bawaslu Jateng & Website bawaslu Kosem) + Pengembangan Website Bawaslu Provinsi Jateng)	2	39.500.000
18	Lisensi (Filmora 1 , Canva 4)	4	6.220.440
Jumlah			7.497.770.440

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp232.267.183.166 dan Rp1.090.770.841. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp206.550.766.000 dan Rp0. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp206.550.766.000 terdiri dari:

Tabel 19. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Uraian	Jumlah
1	Uang di rekening Bank atas Hibah Pilgub dan Pilkada	206.550.462.000
2	Sisa LS RDP	304.000
3	Saldo Akhir Kas Lainnya di BP (1+2)=3 (LPJ)	206.550.766.000

Selanjutnya sisa LS RDP senilai Rp304.000 merupakan sisa dana pemilu yang ada pada Rekening Bawaslu Kabupaten yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan penyetoran ke kas negara. Namun sampai dengan periode penyampaian laporan keuangan ini sisa LS tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan nomor NTPN 1F9A555DF909RMT5 tanggal 17 Januari 2024.

Berikutnya, Uang di rekening Bank atas Hibah Pilgub dan Pilkada merupakan pendapatan yang bersumber dari dana hibah pemerintah daerah yang telah diterima oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Saldo Rekening Penampungan Dana Hibah

No.	Bawaslu	Nama Bank	Tanggal Terima Transfer	Nomor SP2D	Nilai
1	Provinsi Jawa Tengah	Bank Jateng	07/12/2023	230260000000036	77.487.148.000
2	Kab. Banjarnegara	Bank Jateng	01/12/2023	230260000000050	3.261.650.800
3	Kab. Banyumas	Bank Jateng	22/11/2023	230260000000055	8.239.741.200
4	Kab. Batang	Bank Jateng	22/11/2023	230260000000031	5.000.000.000

No.	Bawaslu	Nama Bank	Tanggal Terima Transfer	Nomor SP2D	Nilai
5	Kab. Blora	Bank Jateng	02/12/2023	230260000000059	3.866.690.800
6	Kab. Boyolali	Bank Jateng	24/11/2023	230260000000054	500.000.000
7	Kab. Brebes	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000046	4.874.233.200
8	Kab. Cilacap	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000030	5.000.000.000
9	Kab. Demak	Bank Jateng	10/11/2023	230260000000062	4.166.917.600
10	Kab. Grobogan	Bank Jateng	30/11/2023	230260000000035	4.940.800.000
11	Kab. Jepara	Bank Jateng	30/11/2023	230260000000042	2.834.337.200
12	Kab. Karanganyar	Bank Jateng	27/11/2023	230260000000029	2.800.000.000
13	Kab. Kebumen	Bank Jateng	12/12/2023	230260000000044	4.067.832.000
14	Kab. Kendal	BRI	17/11/2023	230260000000051	5.200.000.000
15	Kab. Klaten	Bank Jateng	02/12/2023	230260000000038	6.400.000.000
16	Kab. Kudus	Bank Jateng	22/11/2023	230260000000061	3.550.593.000
17	Kab. Magelang	Bank Jateng	24/11/2023	230260000000057	5.410.622.000
18	Kab. Pekalongan	Bank Jateng	11/12/2023	230260000000037	500.000.000
19	Kab. Pemalang	BRI	15/12/2023	230260000000058	300.000.000
20	Kab. Purbalingga	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000049	3.200.000.000
21	Kab. Purworejo	Bank Jateng	30/11/2023	230260000000053	4.414.396.000
22	Kab. Rembang	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000043	2.400.000.000
23	Kab. Semarang	Bank Jateng	21/11/2023	230260000000032	5.040.000.000
24	Kab. Sragen	Bank Jateng	30/11/2023	230260000000056	4.320.000.000
25	Kab. Sukoharjo	Bank Jateng	27/11/2023	230260000000041	4.000.000.000
26	Kab. Tegal	Bank Jateng	12/12/2023	230260000000060	5.400.000.000
27	Kab. Temanggung	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000040	3.478.611.600
28	Kab. Wonogiri	Bank Jateng	09/11/2023	230260000000034	4.467.300.000
29	Kab. Wonosobo	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000052	3.825.600.000
30	Kota Magelang	Bank Jateng	27/11/2023	230260000000048	1.410.580.000
31	Kota Pekalongan	Bank Jateng	05/12/2023	230260000000039	880.000.000
32	Kota Salatiga	Bank Jateng	20/11/2023	230260000000045	1.562.400.000
33	Kota Semarang	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000033	6.873.570.800
34	Kota Surakarta	Bank Jateng	04/12/2023	230260000000047	4.458.512.800
35	Kota Tegal	Bank Jateng	01/12/2023	230260000000028	2.418.925.000
Jumlah					206.550.462.000

C.1.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp995.047.499 dan Rp891.692.499. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo belanja dibayar dimuka Tahun 2023 senilai Rp995.047.499 merupakan Saldo belanja dibayar dimuka atas belanja sewa gedung, tanah, dan sarana prasarana lainnya.

Adapun rincian saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp995.047.499 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	NAMA SEWA	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU SEWA (Bulan)	PERIODE		TANGGAL BAYAR	JUMLAH NILAI SEWA (Rp)	PERHITUNGAN BEBAN SEWA PER 31 DESEMBER 2023		SEWA DIBAYAR DIMUKA PER 31 Desember 2023
						MULAI	BERAKHIR			JANGKA WAKTU DILALUI (BULAN)	NILAI	
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M = K/G*L	N=K-M
1	BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL	003/PL.10/JT/01/2023	02/01/2023	12	07/03/2023	06/03/2024	12/01/2023	2.457.000.000	10	2.047.500.000	409.500.000
2	BAWASLU KABUPATEN DEMAK	SEWA TANAH KANTOR	22/KL.701/XII/DO.4-2021	02/12/2021	60	01/01/2021	31/12/2025	10/12/2021	125.000.000	36	75.000.000	50.000.000
3	BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO	SEWA MEUBELAIR GAKKUMDU	1436/PL.10/JT/09/2023	01/12/2022	7	01/08/2023	29/02/2024	08/09/2023	6.930.000	5	4.950.000	1.980.000
4	BAWASLU KABUPATEN BREBES	SEWA GEDUNG/KANTOR	590/PL.03.02/JT-06/05/2023	23/05/2023	12	23/05/2023	22/05/2024	25/05/2023	95.000.000	7	55.416.667	39.583.333
5	BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN	SEWA GEDUNG GAKKUMDU	1154/PL.03.02/JT-12/11/2023	06/11/2023	6	06/11/2023	30/04/2024	24/11/2023	22.500.000	2	7.500.000	15.000.000
6	BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA	SEWA MEUBELAIR GAKKUMDU	336/KU.00.03/JT-20/03/2023	10/03/2023	12	16/03/2023	16/03/2024	01/08/2023	12.000.000	10	10.000.000	2.000.000
7	BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA	Perjanjian Sewa Meubelair 18 Panwascam se-Kabupaten Purbalingga	1233/PL.04/JT-20/02/2023	23/02/2023	6	15/09/2023	14/03/2024	15/09/2023	108.000.000	4	72.000.000	36.000.000
8	BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA	Perjanjian Sewa Peralatan Kantor 18 Panwascam se-Kabupaten Purbalingga	026/Sewa/JT-01.02/X/2023	16/10/2023	6	01/10/2023	31/03/2024	17/10/2023	11.750.000	3	5.875.000	5.875.000
9	BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA	Sewa Gedung Kec. Banjarnegara	993/PL.03.02/JT-29/05/2023	08/05/2023	12	09/05/2023	08/05/2024	11/05/2023	150.000.000	8	100.000.000	50.000.000
10	BAWASLU KABUPATEN WONOSOBO	SEWA GEDUNG KANTOR	13/044.3/PKS/Depren/2023	06/12/2023	12	01/12/2023	30/11/2024	11/12/2023	95.000.000	1	7.916.667	87.083.333
11	BAWASLU KOTA SALATIGA	GEDUNG KANTOR		13/11/2023	12	31/12/2023	31/12/2024		123.210.000	1	10.267.500	112.942.500
12	BAWASLU KABUPATEN TEGAL	SEWA GEDUNG KANTOR		01/08/2023	6	01/08/2023	02/02/2024		120.000.000	5	100.000.000	20.000.000
13	BAWASLU KABUPATEN SRAGEN	SEWA MEUBELAIR Sewa Meubelir 20 Kecamatan Se Kab Sragen		01/08/2023	6	01/08/2023	02/02/2024		120.000.000	5	100.000.000	20.000.000
14	BAWASLU KABUPATEN SRAGEN	SEWA PERALATAN KANTOR PANWASCAM		01/08/2023	6	01/08/2023	02/02/2024		12.000.000	5	10.000.000	2.000.000
15	BAWASLU KABUPATEN SRAGEN	SEWA GEDUNG KANTOR PANWASCAM GESI		06/12/2023	12	01/12/2023	30/11/2024	11/12/2023	95.000.000	1	7.916.667	87.083.333
16	BAWASLU KOTA SALATIGA	Sewa Gedung Kantor		01/08/2023	6	01/08/2023	02/02/2024		120.000.000	5	100.000.000	20.000.000
17	BAWASLU KABUPATEN SRAGEN	Sewa Meubelir Kecamatan Se-Kabupaten Sragen										
JUMLAH									3.781.390.000			995.047.499

C.1.3 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah Pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara. Nilai pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp165.871.342. Pendapatan yang masih harus diterima pada tahun 2022 seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke kas negara serta dicatat pada aplikasi SAKTI Modul Bendahara dan dilakukan jurnal balik pada aplikasi SAKTI Modul GLP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2022

No	Uraian	Kode Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	28A4B55DEVPJMABJ	27-Feb-23	3.771.342
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	053AA48VV578A61K	28-Feb-23	780.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	364B02G4VG2FHM8M	28-Feb-23	3.840.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	1A5CA6U8EKUDH6BD	28-Feb-23	1.920.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	02F323CIFAKRTC07	28-Feb-23	1.275.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	5B01D48VV578B4IQ	28-Feb-23	3.840.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	BBFB148VV578B5P8	28-Feb-23	3.840.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	236586U8EKUDIAFL	28-Feb-23	3.840.000
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	AE1CE8N3EA5C3JIN	01-Mar-23	3.840.000
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	10D857QLUFIVMM98	01-Mar-23	3.840.000
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	ADCA348VV578BBJG	01-Mar-23	3.840.000
12	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	FBF728N3EA5C3PIJ	01-Mar-23	2.880.000

No	Uraian	Kode Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	E708B55DEVPMK9UL	01-Mar-23	3.840.000
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	12ABF61QUQC1501I	01-Mar-23	3.840.000
15	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	ED6E83CIFAN1LTRJ	01-Mar-23	3.840.000
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	094251JNFLI8R05H	01-Mar-23	3.840.000
17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	532506U8EL0JB7TV	01-Mar-23	3.840.000
18	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	F27182G4VG2FG90I	01-Mar-23	600.000
19	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	C3E143CIFAKRT8PN	01-Mar-23	1.365.000
20	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	9AC3E1JNFLI8R0NB	01-Mar-23	3.840.000
21	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	7A0ED0N9VQVSKQOQ	02-Mar-23	3.840.000
22	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	DE1291JNFLI8VRQF	02-Mar-23	3.840.000
23	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	286346U8EKUDIFKB	02-Mar-23	3.840.000
24	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	53B3E6U8EL0JEGAJ	02-Mar-23	3.840.000
25	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	10BE07QLUFIVQ93A	02-Mar-23	3.360.000
26	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	AFE7B7QLUFIVMK7U	02-Mar-23	2.880.000
27	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	C4D0261QUQE70RDG	02-Mar-23	3.840.000
28	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	DDEBB6U8EL0JD7AD	02-Mar-23	3.840.000
29	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	00C8D3CIFAN1PQ1B	02-Mar-23	3.840.000
30	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	7F4163CIFAN1RUM7	02-Mar-23	3.840.000
31	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	8D7033CIFAN1P8NT	03-Mar-23	3.840.000
32	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	4011F61QUQE84H2K	03-Mar-23	2.880.000
33	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	E13A155DEVVRQJPK9	03-Mar-23	3.840.000
34	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	D972961QUQC1584U	03-Mar-23	3.840.000
35	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	B659F0N9VQVTLCH2	03-Mar-23	3.840.000
36	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	949FA7QLUFJ106NS	06-Mar-23	3.840.000
37	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	2E0D53CIFAN5VDQB	06-Mar-23	3.840.000
38	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	E4AE77QLUFJ0THNS	06-Mar-23	3.840.000
39	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	243B90N9VQVSEQT4	06-Mar-23	3.840.000
40	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	78CAD6U8EL0OLRPT	07-Mar-23	2.880.000
41	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	9217555DEVVRVSRSD	07-Mar-23	26.520.000
42	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	E11152G4VG4QLV18	07-Mar-23	3.400.000
Jumlah					165.871.342

C.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp21.135.500 dan Rp33.207.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Persediaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) %
Barang Konsumsi	21.135.500	33.207.000	(36,35)
	21.135.500	33.207.000	(36,35)

Selanjutnya rincian barang konsumsi senilai Rp21.135.500 disajikan sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023

No.	Keterangan	Kuantitas	Nilai
1	Bolpoint 0.5 (Dus)	6	156.000
2	Bolpoint 1.0 (Dus)	4	144.000
3	Paper Clip (Dus)	8	264.000
4	Binder Clip (Dus)	1	35.000
5	Isi Stapler Kecil (Dus)	3	53.000
6	Isi Stapler Besar (Dus)	1	36.000
7	Lem	10	30.000
8	Stip Penghapus	5	12.500
9	Kardus Arsip	2.915	20.405.000
Jumlah			21.135.500

Semua jenis persediaan di atas pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan Nomor 0787/PL.07/JT/12/2023.

Selanjutnya, mutasi nilai Persediaan untuk tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25. Mutasi Persediaan per 31 Desember 2023

Saldo per 31 Desember 2022	33.207.000
Mutasi tambah:	
Belanja barang Persediaan Kosumsi	26.818.000
Mutasi kurang:	
Pemakaian Barang Persediaan	38.889.500
Saldo per 31 Desember 2023	21.135.500

Mutasi tambah pembelian persediaan senilai Rp26.818.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Mutasi Tambah Persediaan per 31 Desember 2023

No.	Keterangan	Kuantitas	Nilai
1	Alat Tulis	47	1.334.500
2	Tinta Tulis, Tinta Stempel	11	165.000
3	Penjepit Kertas	168	2.169.500
4	Penghapus/Korektor	11	35.500
5	Buku Tulis	9	289.500
6	Ordner Dan Map	154	3.434.500
7	Penggaris	5	15.000
8	Cutter (Alat Tulis Kantor)	24	219.000
9	Alat Perekat	60	255.500
10	Staples	9	85.500
11	Isi Staples	5	47.500
12	Alat Tulis Kantor Lainnya	66	723.500
13	Kertas HVS	208	11.345.500
14	Berbagai Kertas	101	1.725.500
15	Amplop	73	1.559.500
16	Tinta/Toner Printer	31	2.927.500
17	USB/Flash Disk	3	171.000
18	Mouse	1	148.000
19	Batu Baterai	6	166.500
Jumlah			26.818.000

Adapun mutasi kurang senilai Rp38.889.500 persediaan yang berasal dari pemakaian dijelaskan melalui rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Mutasi kurang Persediaan per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Kuantitas	Rupiah
117111	Barang Konsumsi		
1010301001	Alat Tulis	65	2.089.500
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	11	165.000
1010301003	Penjepit Kertas	298	2.524.500
1010301004	Penghapus/Korektor	18	66.500
1010301005	Buku Tulis	9	289.500
1010301006	Ordner Dan Map	184	4.153.000
1010301007	Penggaris	5	15.000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	24	219.000
1010301010	Alat Perekat	58	251.000
1010301012	Staples	9	85.500
1010301013	Isi Staples	7	82.500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	69	747.500
1010302001	Kertas HVS	225	12.263.500
1010302002	Berbagai Kertas	118	2.000.000

Kode	Uraian	Kuantitas	Rupiah
1010302004	Amplop	83	1.779.500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	610	4.270.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	59	5.622.500
1010304006	USB/Flash Disk	5	283.000
1010304010	Mouse	1	148.000
1010306010	Batu Baterai	14	394.500
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	20	960.000
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	5	480.000
Jumlah		1.897	38.889.500

C.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp13.716.645.235 dan Rp4.078.653.355. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.132.877.000 dan Rp0. Rincian nilai tanah sebesar Rp5.132.877.000 terdiri dari:

1. Tanah sebesar Rp551.250.000 adalah sebuah tanah milik Kementerian Keuangan yang dihibahkan ke Bawaslu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.6/KN.5/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara Idle pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. maka telah ditetapkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengguna BMN eks BMN Idle berupa Rumah Negara yang terletak di Jalan Bukit Kusuma No.1. Desa Sumurboto. Kecamatan Banyumanik. Semarang. Jawa Tengah. Serah terima tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor KPKNL Semarang selaku Pengelola Barang kepada Kepala Bagian Umum. Biro Administrasi Bawaslu a.n. Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pengguna Barang sesuai BAST BMN eks BMN Idle dengan Nomor BAST-001/WKN.09/KNL.01/2019 tanggal 18 Juni 2019. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara dari Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 58/PL.09/KB/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendapatkan transfer masuk atas aset pada aplikasi SAKTI sebesar Rp551.250.000.
2. Tanah sebesar Rp4.581.627.000 adalah sebuah tanah milik Kementerian keuangan C.q Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sesuai dengan Berita Acara Serah Terima alih status barang milik negara berupa tanah dan bangunan pada kementerian keuangan c.q kantor pelayanan pajak pratama Pati kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum c.q.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sesuai dengan Nomor BA-24/MK.1/SJ.7/2023 tanggal 24 Juli 2023. Selanjutnya Berdasarkan berita acara transfer barang milik negara dari sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 48/PL.09/KB/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.273.715.923 dan Rp26.721.993.642.

Rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.273.715.923 sesuai dengan Hasil Inventarisasi BMN yang telah dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan pembukuan pada aplikasi SAKTI modul aset secara lengkap disajikan sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Buah)	Nilai (Rp)
30103	Alat Bantu	35	754.600.000
30201	Alat Angkutan Darat Bermotor	16	4.222.504.000
30202	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7	14.000.000
30501	Alat Kantor	780	3.180.912.750
30502	Alat Rumah Tangga	2.671	8.370.544.973
30601	Alat Studio	174	834.000.932
30602	Alat Komunikasi	293	577.677.400
30701	Alat Kedokteran	34	54.111.600
31001	Komputer Unit	904	12.212.736.112
31002	Peralatan Komputer	480	3.035.603.156
31901	Peralatan Olah Raga	5	17.025.000
Jumlah		5.399	33.273.715.923

Adapun perbandingan antara Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 dan 2022 dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 29. Perbandingan Peralatan dan Mesin 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	Kenaikan/ (Penurunan) %
Peralatan dan Mesin	33.273.715.923	26.721.993.642	6.551.722.281	24,51
	33.273.715.923	26.721.993.642	6.551.722.281	24,51

Kenaikan Peralatann dan Mesin tersebut dijelaskan melalui mutasi nilai peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 30. Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	26.721.993.642
Mutasi tambah:	
Pembelian	7.272.265.000
Transfer Masuk	34.500.000
Perolehan Lainnya	5.000.000
Reklas Aset Lainnya Ke Aset Tetap	1.355.466.489
Total	35.389.895.131
Mutasi Kurang;	
Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya	2.115.509.208
Total	2.115.509.208
Saldo per 31 Desember 2023	33.273.715.923

Penjelasan Mutasi: Pembelian sebesar Rp7.272.265.000 merupakan belanja yang diperoleh dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. rincian belanja barang dan mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 31. Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Nomor	Keterangan	Jumlah (Buah)	Nilai (Rp)
1	CCTV	35	435.750.000
2	LCD Projector/infocus	35	486.500.000
3	A.C. Split	6	74.805.000
4	Stabilisator	1	6.700.000
5	Tripod Camera	2	2.840.000
6	Lensa Camera	4	57.700.000
7	Camera Digital	1	56.800.000

Nomor	Keterangan	Jumlah (Buah)	Nilai (Rp)
8	Video Conference	1	18.050.000
9	Clip On	2	9.800.000
10	Laptop	243	4.717.420.000
11	Hard Disk	1	5.000.000
12	Monitor	35	84.875.000
13	Printer	35	133.000.000
14	Scanner	71	1.155.525.000
15	External/Portable Hardisk	4	27.500.000
Jumlah			7.272.265.000

Selain itu, terdapat mutasi tambah dari perolehan Peralatan dan Mesin berupa :

1. Firewall senilai Rp34.500.000 yang diakui sebagai transfer masuk dari Bawaslu sesuai dengan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara dari Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 58/PL.09/KB/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Sementara BMN di Lingkungan Bawaslu nomor 0184/PL.05/BAKPB/2023 tanggal 25 Juli 2023.
2. Perolehan Lainnya sebesar Rp5.000.000 merupakan reward dari pihak ke 3 yaitu telkomsel kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo sesuai dengan Berita acara serah terima barang Nomor K.Tel.272/KU/000/4E1H0000/2023 tanggal 6 Juni 2023 berupa LCD proyektor.

Berikutnya, mutasi tambah berupa Reklas Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp1.355.466.489 adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yang mengalami perubahan kondisi dari rusak berat ke rusak ringan serta dari penghentian aset menjadi penggunaan kembali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap

Kode	Uraian	Jumlah (Buah)	Nilai (Rp)
166112	Aset Tetap Yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	8.090.909
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1	1.419.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	2	10.735.000
3.06.02.01.020	Telepon Digital	3	3.270.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	101	1.012.594.500
3.10.01.02.002	Laptop	27	306.044.440
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	13.312.640
Jumlah		139	1.355.466.489

Selanjutnya, mutasi kurang sebesar Rp2.115.509.208 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp2.115.509.208 merupakan perubahan status BMN yang kondisinya rusak berat sehingga dihentikan dari penggunaannya sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN Kondisi Rusak Berat Nomor: 754/PL.07/JT/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 Adapun rincianya adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Penghentian Aset Dari Penggunaan

Kode	Uraian	Jumlah (Buah)	Nilai (Rp)
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	3	16.502.400
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.750.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	6	34.156.818
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	20	13.808.300
3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	4.900.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	2	8.470.000
3.05.02.06.046	Handy Cam	5	13.500.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	134	1.340.669.500
3.10.01.02.002	Laptop	39	442.200.950
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	75	237.571.240
3.10.02.03.017	External/Portable Hardisk	1	1.980.000
Jumlah		289	2.115.509.208

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.531.806.000 dan Rp0. Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebuah Gedung / Bangunan milik Kementerian Keuangan yang dihibahkan ke Bawaslu sesuai dengan:

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.6/KN.5/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara *Idle* pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. maka telah ditetapkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengguna BMN eks BMN *Idle* berupa Rumah Negara yang terletak di Jalan Bukit Kusuma No.1. Desa Sumurboto. Kecamatan Banyumanik. Semarang. Jawa Tengah. yang selanjutnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi aset milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya. berdasarkan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara dari Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 58/PL.09/KB/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp247.740.000.
- Berita Acara Nomor BA-24/MK.1/SJ.7/2023 tanggal 24 Juli 2023. Selanjutnya Berdasarkan berita acara transfer barang milik negara dari sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 48/PL.09/KB/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 senilai Rp1.284.066.000.

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar minus Rp26.221.753.688 dan minus Rp22.643.340.287.

Tabel 34. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Buah)	Nilai (Rp)
30103	Alat Bantu	35	539.000.000
30201	Alat Angkutan Darat Bermotor	16	3.530.532.287
30202	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7	14.000.000
30501	Alat Kantor	780	2.321.405.200
30502	Alat Rumah Tangga	2.671	8.066.369.477
30601	Alat Studio	174	662.677.402
30602	Alat Komunikasi	293	569.876.300
30701	Alat Kedokteran	34	38.028.120
31001	Komputer Unit	904	7.712.510.066
31002	Peralatan Komputer	480	1.873.780.781
31901	Peralatan Olah Raga	5	17.025.000
40101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	725.776.435
40102	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8	150.772.620
Jumlah			26.221.753.688

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp52.650.311 dan Rp156.019.181. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp993.406.561 dan Rp950.246.891. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupa software yang merupakan website dan aplikasi. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Uraian Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Alamat	Jumlah (Rp)
1	Website Utama Bawaslu Sukoharjo	http://sukoharjo.bawaslu.go.id	23.500.000
2	Website Utama Bawaslu Kab Semarang	http://semarangkab.bawaslu.go.id	10.000.000
3	Website Utama Bawaslu Kab Klaten	http://klaten.bawaslu.go.id	6.600.000
4	Website Utama Bawaslu Kab Kudus	http://kudus.bawaslu.go.id	38.560.500
5	Website Utama Bawaslu Kab Rembang	http://rembang.bawaslu.go.id	7.000.000
6	Website Utama Bawaslu Kota Semarang	http://semarangkota.bawaslu.go.id	14.900.000
7	Website Utama Bawaslu Kab Pemalang	http://pemalang.bawaslu.go.id	15.000.000
8	Website Utama Bawaslu Kab Boyolali	http://boyolali.bawaslu.go.id	11.000.000
9	Website Utama Bawaslu Kab Pekalongan	http://pekalongankab.bawaslu.go.id	13.500.000
10	Website Utama Bawaslu Kota Pekalongan	http://pekalongankota.bawaslu.go.id	19.500.000
11	Website Utama Bawaslu Kab Cilacap	http://cilacap.bawaslu.go.id	17.450.000
12	Website PPID Bawaslu Kab Klaten	http://klaten.bawaslu.go.id	15.400.000
13	Website Utama Bawaslu Kota Surakarta	http://surakarta.bawaslu.go.id	38.200.000
14	Website Utama Bawaslu Kab Blora	http://blora.bawaslu.go.id	23.800.000
15	Website Utama Bawaslu Kab Temanggung	http://temanggung.bawaslu.go.id	32.450.000
16	Website Utama Bawaslu Kab Banyumas	http://banyumas.bawaslu.go.id	18.500.000
17	Website Utama Bawaslu Kab Purbalingga	http://purbalingga.bawaslu.go.id	11.557.500
18	Website Utama Bawaslu Kab Wonogiri	http://wonogiri.bawaslu.go.id	18.500.000
19	Website Utama Bawaslu Kota Magelang	http://magelangkota.bawaslu.go.id	17.250.000
20	Website Utama Bawaslu Kab Kebumen	http://kebumen.bawaslu.go.id	5.000.000

No	Uraian	Alamat	Jumlah (Rp)
21	Website Utama Bawaslu Kab Wonosobo	http://wonosobo.bawaslu.go.id	23.956.363
22	Website Utama Bawaslu Kab Pati	http://pati.bawaslu.go.id	6.000.000
23	Website Utama Bawaslu Kab Brebes	http://brebes.bawaslu.go.id	14.000.000
24	Website Utama Bawaslu Kab Sragen	http://sragen.bawaslu.go.id	5.575.000
25	Website Utama Bawaslu Kota Salatiga	http://salatiga.bawaslu.go.id	29.500.000
26	Website Utama Bawaslu Kota Tegal	http://tegalkota.bawaslu.go.id	29.228.528
27	Website Utama Bawaslu Kab Jepara	http://jepara.bawaslu.go.id	34.750.000
28	Website Utama Bawaslu Kab Purworejo	http://purworejo.bawaslu.go.id	22.000.000
29	Web PPID Kab Pekalongan	http://ppid.pekalongankab.bawaslu.go.id	10.000.000
30	Web PPID Kab Pati	http://ppid.pati.bawaslu.go.id	27.000.000
31	Web PPID Kab Pemalang	http://ppid.pemalang.bawaslu.go.id	22.500.000
32	Web PPID Kab Tegal	http://ppid.tegalkab.bawaslu.go.id	4.500.000
33	Web PPID Kab Semarang	http://ppid.semarangkab.bawaslu.go.id	10.500.000
34	Web PPID Kab Rembang	http://ppid.rembang.bawaslu.go.id	9.500.000
35	Web PPID Kab Sragen	http://ppid.sragen.bawaslu.go.id	16.500.000
36	Web PPID Bawaslu Prov Jateng	http://ppid.bawaslujateng.go.id	11.800.000
37	E Library Bawaslu Jateng	http://e-library.bawaslujateng.go.id	11.800.000
38	Web Utama Kab Batang	http://batang.bawaslu.go.id	8.500.000
39	Web PPID Kab Batang	http://ppid.batang.bawaslu.go.id	23.000.000
40	Web Utama Kab Magelang	http://magelangkab.bawaslu.go.id	16.830.000
41	Web PPID Kab Kendal	http://ppid.kendal.bawaslu.go.id	37.000.000

No	Uraian	Alamat	Jumlah (Rp)
42	Web PPID Kab Purbalingga	http://ppid.purbalingga.bawaslu.go.id	5.000.000
43	Web PPID Kab Brebes	http://ppid.brebes.bawaslu.go.id	10.000.000
44	Web Utama Kab Banjarnegara	http://banjarnegara.bawaslu.go.id	18.000.000
45	Web PPID Kab Grobogan	http://grobogan.bawaslu.go.id	6.000.000
46	Web PPID Kab Karanganyar	http://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id	18.300.000
47	Web PPID Kab Boyolali	http://ppid.boyolali.bawaslu.go.id	11.000.000
48	Web PPID Kota Semarang	http://ppid.semarangkota.bawaslu.go.id	11.500.000
49	Aplikasi PPID Kab Rembang	http://ppid.rembang.bawaslu.go.id	5.669.000
50	Web PPID Kota Pekalongan	http://ppid.pekalongankota.bawaslu.go.id	12.500.000
51	Web PPID Kab Demak	http://ppid.demak.bawaslu.go.id	14.800.000
52	Web PPID Kab Banjarnegara	http://ppid.banjarnegara.bawaslu.go.id	15.000.000
53	Web PPID Kab Wonogiri	http://ppid.wonogiri.bawaslu.go.id	10.670.000
54	Web PPID Kab Cilacap	http://ppid.cilacap.bawaslu.go.id	13.750.000
55	Web PPID Kab Grobogan	http://ppid.grobogan.bawaslu.go.id	6.000.000
56	Web Sareng Bawaslu	http://sareng.bawaslu.go.id	25.000.000
57	Web Siganteng	http://siganteng.bawaslu.go.id	10.000.000
58	Web Simedia	https://simedia.jateng.bawaslu.go.id	24.950.000
59	Web Simedia pengembangan	https://simedia.jateng.bawaslu.go.id/	10.000.000
60	Website Kota Semarang	https://semarangkota.bawaslu.go.id/	15.000.000
61	Website Provinsi	https://jateng.bawaslu.go.id/	14.500.000
62	Lisensi		3.659.670
Jumlah			993.406.561

C.3.2 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp560.981.010. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar minus Rp940.756.250 dan minus Rp1.355.208.720. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset Lain-lain	0	(554.901.200)
2	Aset Tak Berwujud	(940.756.250)	(800.307.520)
Total		(940.756.250)	(1.355.208.720)

Saldo sebesar minus Rp940.756.250 merupakan akumulasi penyusutan aset tak berwujud yang terdiri dari Software Komputer senilai Rp940.573.266 dan Lisensi senilai Rp182.984.

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp162.527.068 dan Rp109.592.912.

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp162.527.068 dan Rp109.592.912. Utang Kepada Pihak Ketiga di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

Tabel 37. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023

No.	Akun	Keterangan	Jumlah
1	521111	Langganan Internet Desember 2023	30.684.173
2	521213	Honorarium Panwas Ad-Hoc Desember 2023	93.100.000

No.	Akun	Keterangan	Jumlah
3	522111	Langganan Listrik Desember 2023	34.180.492
4	522112	Pembayaran Langganan Telepon bulan Desember	672.402
5	522113	Belanja Langganan Air Bulan Desember 2023	3.890.001
Jumlah			162.527.068

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp221.173.717.477 dan Rp5.215.850.465. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp221.336.244.545 dan kewajiban sebesar Rp162.527.068 Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Adapun perbandingan Ekuitas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Ekuitas	221.173.717.477	5.215.850.465	4.140,42
Jumlah	221.173.717.477	5.215.850.465	4.140,42

Adapun Perubahan Ekuitas pada tahun 2023 hingga bulan Desember ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 39. Perubahan Ekuitas Tahun 2023

Ekuitas Awal	5.215.850.465
Surplus/Defisit LO	(483.979.182.495)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(2.560.770)
Transaksi Antar Entitas	699.939.610.277
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	215.957.867.012
Ekuitas Akhir	221.173.717.477

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. 1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.140.639 dan Rp5.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37
Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Anggaran lain-lain	22.140.639	5.000.000	342,81
Jumlah Belanja	22.140.639	5.000.000	342,81

Realisasi Pendapatan anggaran lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.140.639 merupakan pendapatan yang disebabkan oleh Tindak Lanjut Temuan BPK atas pemeriksaan Pilkada 2008 pada Tahun 2009 yang bersumber dari dana Hibah serta adanya Bunga Jasa Giro yang timbul pada Rekening Dana Pemerintah (RDP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Setor Bunga Bulan Februari 2023 Bawaslu Kab purworejo	10-Apr-23	E9D5B1JNFLLFV6EF	118.517
2	Setor Bunga Bulan Februari S.d April 2023 Bawaslu Kab Wonosobo	02-Mei-23	99D1E3CIFAQQFMJF	53.119
3	Setor Bunga Bulan Februari S.d Maret 2023 Bawaslu Kab Wonosobo	02-Mei-23	7F35E61QUQHVMNEO	136.259
4	Setor Bunga Giro Bulan Feb-Mar 2023 Bawaslu Kabupaten Pemalang	11-Mei-23	42DF23CIFAT6O8CR	144.744
5	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Feb-April 2023 Bawaslu Kabupaten Pemalang	11-Mei-23	C4D680N9VR61H8US	23.866
6	Setor Bunga Giro Kecamatan Mei 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	05-Jun-23	FB5B38N3EAC6SJ9N	22.104
7	Setor Bunga Giro RDP Kabupaten Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Brebes	19/06/2023	72FF71JNFLRKA37H	188.977

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
8	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Juni 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	03/07/2023	B0B308N3EAF5GEN1	23.878
9	Setor Bunga Jasa Giro Kecamatan Feb - Juni 2023 Bawaslu Kota Semarang	18-Jul-23	B99128N3EAHJ08PB	36.666
10	Setor Bunga Giro Bawaslu Kota Semarang Feb - Mar 2023	18-Jul-23	30A293CIFB38I9H7	275.237
11	Setor Jasa Giro Kecamatan Bulan Juli Bawaslu Kab. Wonosobo	01-AUG-23	B760748VV5M7BBFK	23.720
12	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Kendal Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	3A3E648VV5OHLLNK	151.920
13	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Kendal Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	D402C6U8ELFMSL83	323.117
14	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Kebumen Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	F4D168N3EAKELNK7	5.680
15	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Kebumen Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	E2CF30N9VREV0N90	668.831
16	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Semarang dan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Semarang Bulan Januari s/d Juli 2023	'08-AUG-23	114920N9VREV4524	313.326
17	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Sragen Bulan Februari dan Maret 2023	'09-AUG-23	9A2DE0N9VRF07S0Q	138.583
18	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Maret s.d Juli 2023	'09-AUG-23	5A12E0N9VRF02508	317.806
19	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Magelang Bulan s.d Juli 2023	'09-AUG-23	4EEE72G4VGJP0750	37.542
20	Setor Bunga Giro Kecamatan se Banyumas Bulan Januari s.d Juni 2023	'09-AUG-23	F75DB1JNFM1CL8SD	99.153
21	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Salatiga Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	7A9DB61QUQTBNAE4	69.085
22	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kota Pekalongan dan Bawaslu	10-AUG-23	5EB8C2G4VGJQ68CS	57.512

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
	Kota Pekalongan Bulan Januari s/d Juli 2023			
23	Setor Bunga Giro Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kudus Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	70CAE7QLUG22E37O	159.824
24	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Banjarnegara Bulan Januari sd Juli 2023	10-AUG-23	0A90555DF0AT1OAJ	55.103
25	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Tegal Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	9173055DF0AVA9NT	42.918
26	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Klaten Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	F2AB58N3EAKEP3AP	239.399
27	Setor Bunga Giro Bawaslu Kota Tegal dan Panwaslu Kecamatan se Kota Tegal Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	A5A0C2G4VGJO0K0O	37.414
28	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Grobogan dan Panwaslu Kecamatan se Kab Grobogan Bulan Februari Maret 2023	10-AUG-23	4C11648VV5OGQ2PS	307.968
29	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Grobogan dan Panwaslu Kecamatan Bulan Mei sd Juli 2023	10-AUG-23	101692G4VGJORN4S	42.755
30	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Banjarnegara Bulan Januari sd Juli 2023	10-AUG-23	'8B31155DF0AT1NUD	118.246
31	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Cilacap dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Cilacap Bulan Januari s.d. Juli 2023	10-AUG-23	B54126U8ELFN37AJ	265.797
32	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Pekalongan Bulan Januari sd Juni 2023	10-AUG-23	9207961QUQTAFO80	20.865
33	Setor Bunga Giro Kecamatan Tlogowungu dan Margoyoso Bulan Januari - Juli 2023	10-AUG-23	EAB8D1JNFM1BH7UV	4.766
34	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Blora dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Blora Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	E031848VV5OGP642	166.909

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
35	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta dan Bawaslu Kota Surakarta Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	5713A1JNFM1DP9FR	57.135
36	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kab Sukoharjo Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	F64DF8N3EAKH0OKN	37.864
37	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Demak Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	1FADB7QLUG25KG2G	15.903
38	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Matesin Kabupaten Karanganyar Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	C44AC7QLUG24JNUQ	7.648
39	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Rembang dan Panwaslu Kecamatan se Kab Rembang Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	C428F1JNFM1DMA3V	45.657
40	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Demak Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	3BA682G4VGJP07LI	53.404
41	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Jepara dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Jepara Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	79E050N9VRF06VK2	188.395
42	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kab Boyolali Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	486FE55DF0B0DBR3	23.815
43	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Klaten Bulan Januari s/d Juli 2023	14-AUG-23	5E87A3CIFB67JAMF	80.734
44	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Brebes Bulan Januari s/d Juli 2023	18-AUG-23	F3ACD6U8ELFVJP01	134.563
45	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Agustus Bawaslu Kab. Wonosobo	01-Sep-23	85BA961QUQU06U60	22.123
46	Setor Bunga jasa giro bulan agustus kab temanggung bulan Agustustus	11-Sep-23	CDA720N9VRHV4TI0	34.672
47	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Blora Bulan Agustus 2023	26-Sep-23	876B00N9VRIF437A	9.534
48	Bunga Jasa Giro Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2023	05/10/2023	7D2197QLUG7TPJEG	3.980.322

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
49	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan September 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	31/10/2023	F90660N9VRL5GCC2	29.082
50	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan September 2023	20/10/2023	E4D830N9VRL9QJMA	11.349
51	Setor Bunga Giro Kecamatan Bawaslu Kab. Wonosobo Oktober 2023	16/10/2023	8F3183CIFBCPRNAN	30.521
52	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan Oktober 2023	28-DEC-23	DDF4B8N3EAU15AC1	26.988
53	Setor bunga giro kecamatan bulan November Kabupaten Wonosobo	29-DEC-23	BD6090N9VROINB7G	29.418
54	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan November 2023	29-DEC-23	2A75F61QUR9BRFAG	29.970
55	Setor Jasa Giro Kecamatan di Kab. Rembang Bulan Agustus 2023	30-DEC-23	2A1840N9VRR817DA	14.533
56	Setor Jasa Giro Kec. Rembang Nov Des 2023	29-DEC-23	138BD0N9VRR81G3O	7.990
57	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan Desember 2023	28-DEC-23	A458F1JNFMDRKGOD	28.941
58	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Pemalang Bulan Mei s.d Desember 2023	29-DEC-23	F7CCA6U8ELS62LK7	203.189
59	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Rembang Bulan Agustus - Desember 2023	28-DEC-23	B46228N3EB102KJV	37.130
60	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Semarang Bulan Juli s.d Desember 2023	29-DEC-23	5B3B13CIFBILJ9LN	67.932
61	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Brebes Bulan Agustus s.d Desember 2023	29-DEC-23	1E9FE7QLUGEJKB9E	259.828
62	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Demak Bulan September s.d Desember 2023	28-DEC-23	416692G4VH0965N4	20.444

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
63	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	30E6548VV650V08K	70.338
64	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Desember 2023	27-DEC-23	D4DE17QLUGEJKF4S	9.493
65	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Desember 2023	29-DEC-23	FE4E78N3EB101NMB	96.597
66	Setor Bunga Giro Kecamatan Tlogowungu dan Margoyoso Bawaslu Kab Pati Bulan Agustus - Desember 2023	13-DEC-23	8622D61QUR9QQI7I	29.036
67	Setor Bunga Giro Panwas Se Kecamatan di Kabupaten Klaten bulan Juli s.d Desember 2023	30-DEC-23	98EF82G4VH0AB5UO	285.425
68	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Kudus Bulan September s.d Desember 2023	21-DEC-23	C707B1JNFMDSRFS7	114.233
69	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Temanggung Bulan September s.d Desember 2023	29-DEC-23	F0D048N3EB103CAD	231.491
70	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar bulan Agustus s.d Desember 2023	21-DEC-23	C1D9E6U8ELS8BJR7	11.385
71	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	8257C3CIFBIMMUN5	13.776
72	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta bulan Agustus s.d Desember 2023	27-DEC-23	E36AE7QLUGEJN140	285.616
73	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Cilacap bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	CFB067QLUGEKO12K	314.545
74	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Magelang Bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	5823D8N3EB1142LH	92.581
75	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Tegal Bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	F70A10N9VRRHF24M	22.929

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
76	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Tegal Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	2100D3CIFBIMOD4P	210.554
77	Setor Jasa Giro kecamatan Bulan Desember 2023 bawaslu Kab. Tegal	30-DEC-23	1165E8N3EB1176MF	117.228
78	Setor Bunga Giro Panwas Se Kecamatan di Kota Salatiga bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	925C80N9VRRHHB8C	104.722
80	Pengembalian Belanja Panwaskab. Wonogiri TA 2008	08-Feb-23	984D61JNFLFDM8DF	500.000
81	Pengembalian Belanja Panwaskab Wonogiri TA 2008	11-Mei-23	C175F0N9VR61G2VI	500.000
82	Pengem. Belanja Bawaslu Kab. Pekalongan TA 2018 (Pokja Kec. Wonopringgo)	12-Mei-23	DFA891JNFLOH693H	1.450.000
83	Pengem. Belanja Bawaslu Kab. Pekalongan TA 2018 (Pokja Kec. Karangdadap)	12-Mei-23	916C955DF022Q9M3	3.800.000
84	Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA 2008	15-Mei-23	8DC961JNFLODT6MV	500.000
85	Pengembalian Belanja Panwaskab Klaten TA 2008	18-Jul-23	3ED741JNFLUEN9OP	500.000
86	Pengembalian Belanja Panwaskab Wonogiri TA 2008	24-Jul-23	D04708N3EAHUOA2L	200.000
87	Pengembalian Belanja Bawaslu Kec. Karanganyar Kabupaten Pekalongan TA 2018	24-Jul-23	7ABF88N3EAHUO6AB	1.600.000
88	Pengembalian Belanja Panwaskab. Klaten TA 2008	29-Agu-23	BA16A6U8ELG3PBE7	500.000
89	Pengembalian Belanja TA 2008 Panwaslu Kab. Wonogiri	19-Sep-23	9C61161QUR0ETKCG	200.000
90	Pengembalian Belanja TA 2008 Panwaslu Kab. Wonogiri	28-Des-23	73C6248VV650UV7G	200.000
Jumlah				22.140.639

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp22.140.639 sudah disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Terdapat perbedaan/selisih antara Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LRA dan LO sebesar Rp379.385.331 dan Rp22.140.639, terkait selisih tersebut dijelaskan pada tabel mutasi sebagai berikut:

Tabel 39
Mutasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

LRA:	
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	12.190.639
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.780.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	353.464.692
Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.950.000
Jumlah Pendapatan LRA	379.385.331
Mutasi Kurang	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.780.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	353.464.692
Jumlah Mutasi Kurang	357.244.692
Pendapatan LO	22.140.639

- a. Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp12.190.639 terdiri atas:

Tabel 40
Pendapatan Jasa Giro

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Setor Bunga Bulan Februari 2023 Bawaslu Kab purworejo	10-Apr-23	E9D5B1JNFLLFV6EF	118.517
2	Setor Bunga Bulan Februari S.d April 2023 Bawaslu Kab Wonosobo	02-May-23	99D1E3CIFAQQFMJF	53.119
3	Setor Bunga Bulan Februari S.d Maret 2023 Bawaslu Kab Wonosobo	02-May-23	7F35E61QUQHVMNEO	136.259
4	Setor Bunga Giro Bulan Feb- Mar 2023 Bawaslu Kabupaten Pemalang	11-May-23	42DF23CIFAT6O8CR	144.744
5	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Feb-April 2023 Bawaslu Kabupaten Pemalang	11-May-23	C4D680N9VR61H8US	23.866
6	Setor Bunga Giro Kecamatan Mei 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	05-Jun-23	FB5B38N3EAC6SJ9N	22.104
7	Setor Bunga Giro RDP Kabupaten Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Brebes	19/06/2023	72FF71JNFLRKA37H	188.977
8	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Juni 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	03/07/2023	B0B308N3EAF5GEN1	23.878

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
9	Setor Bunga Jasa Giro Kecamatan Feb - Juni 2023 Bawaslu Kota Semarang	18-Jul-23	B99128N3EAHJ08PB	36.666
10	Setor Bunga Giro Bawaslu Kota Semarang Feb - Mar 2023	18-Jul-23	30A293CIFB38I9H7	275.237
11	Setor Jasa Giro Kecamatan Bulan Juli Bawaslu Kab. Wonosobo	01-AUG-23	B760748VV5M7BBFK	23.720
12	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab kendal Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	3A3E648VV5OHLNKK	151.920
13	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Kendal Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	D402C6U8ELFMSL83	323.117
14	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Kebumen Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	F4D168N3EAKELNK7	5.680
15	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Kebumen Bulan Januari sd Juli 2023	'08-AUG-23	E2CF30N9VREV0N90	668.831
16	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Semarang dan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Semarang Bulan Januari s/d Juli 2023	'08-AUG-23	114920N9VREV4524	313.326
17	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Sragen Bulan Februari dan Maret 2023	'09-AUG-23	9A2DE0N9VRF07S0Q	138.583
18	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung Bulan Maret s.d Juli 2023	'09-AUG-23	5A12E0N9VRF02508	317.806
19	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Magelang Bulan s.d Juli 2023	'09-AUG-23	4EEE72G4VGJP0750	37.542
20	Setor Bunga Giro Kecamatan se Banyumas Bulan Januari s.d Juni 2023	'09-AUG-23	F75DB1JNFM1CL8SD	99.153
21	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Salatiga Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	7A9DB61QUQTBNAE4	69.085

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
22	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kota Pekalongan dan Bawaslu Kota Pekalongan Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	5EB8C2G4VGJQ68CS	57.512
23	Setor Bunga Giro Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Kudus Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	70CAE7QLUG22E37O	159.824
24	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Banjarnegara Bulan Januari sd Juli 2023	10-AUG-23	0A90555DF0AT1OAJ	55.103
25	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Tegal Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	9173055DF0AVA9NT	42.918
26	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Klaten Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	F2AB58N3EAKEP3AP	239.399
27	Setor Bunga Giro Bawaslu Kota Tegal dan Panwaslu Kecamatan se Kota Tegal Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	A5A0C2G4VGJO0K0O	37.414
28	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Grobogan dan Panwaslu Kecamatan se Kab Grobogan Bulan Februari Maret 2023	10-AUG-23	4C11648VV5OGQ2PS	307.968
29	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Grobogan dan Panwaslu Kecamatan Bulan Mei sd Juli 2023	10-AUG-23	101692G4VGJORN4S	42.755
30	Setor Bunga Giro Bawaslu Kab Banjarnegara Bulan Januari sd Juli 2023	10-AUG-23	'8B31155DF0AT1NUD	118.246
31	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Cilacap dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Cilacap Bulan Januari s.d. Juli 2023	10-AUG-23	B54126U8ELFN37AJ	265.797
32	Setor Bunga Giro Rekening RDP di Kecamatan Se Bawaslu Kab Pekalongan Bulan Januari sd Juni 2023	10-AUG-23	9207961QUQTAFO80	20.865

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
33	Setor Bunga Giro Kecamatan Tlogowungu dan Margoyoso Bulan Januari - Juli 2023	10-AUG-23	EAB8D1JNFM1BH7UV	4.766
34	Setor Bunga Giro Bawaslu Kabupaten Blora dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Blora Bulan Januari s/d Juli 2023	10-AUG-23	E031848VV5OGP642	166.909
35	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta dan Bawaslu Kota Surakarta Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	5713A1JNFM1DP9FR	57.135
36	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kab Sukoharjo Bulan s.d Juli 2023	10-AUG-23	F64DF8N3EAKH0OKN	37.864
37	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Demak Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	1FADB7QLUG25KG2G	15.903
38	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Matesin Kabupaten Karanganyar Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	C44AC7QLUG24JNUQ	7.648
39	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Rembang dan Panwaslu Kecamatan se Kab Rembang Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	C428F1JNFM1DMA3V	45.657
40	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Demak Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	3BA682G4VGJP07LI	53.404
41	Setor Jasa Giro Bawaslu Kabupaten Jepara dan Panwaslu Kecamatan Se Kab Jepara Bulan Januari s.d. Juli 2023	11-AUG-23	79E050N9VRF06VK2	188.395
42	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kab Boyolali Bulan s.d Juli 2023	11-AUG-23	486FE55DF0B0DBR3	23.815
43	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Klaten Bulan Januari s/d Juli 2023	14-AUG-23	5E87A3CIFB67JAMF	80.734
44	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Brebes Bulan Januari s/d Juli 2023	18-AUG-23	F3ACD6U8ELFVJP01	134.563

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
45	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan Agustus Bawaslu Kab. Wonosobo	01-Sep-23	85BA961QUQU06U60	22.123
46	Setor Bunga jasa giro bulan agustus kab temanggung bulan Agustustus	11-Sep-23	CDA720N9VRHV4TI0	34.672
47	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan se Kabupaten Blora Bulan Agustus 2023	26-Sep-23	876B00N9VRIF437A	9.534
48	Bunga Jasa Giro Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2023	05/10/2023	7D2197QLUG7TPJEG	3.980.322
49	Setor Bunga Giro Kecamatan Bulan September 2023 Bawaslu Kab. Wonosobo	31/10/2023	F90660N9VRL5GCC2	29.082
50	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan September 2023	20/10/2023	E4D830N9VRL9QJMA	11.349
51	Setor Bunga Giro Kecamatan Bawaslu Kab. Wonosobo Oktober 2023	16/10/2023	8F3183CIFBCPRNAN	30.521
52	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan Oktober 2023	28-DEC-23	DDF4B8N3EAU15AC1	26.988
53	Setor bunga giro kecamatan bulan November Kabupaten Wonosobo	29-DEC-23	BD6090N9VROINB7G	29.418
54	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan November 2023	29-DEC-23	2A75F61QUR9BRFAG	29.970
55	Setor Jasa Giro Kecamatan di Kab. Rembang Bulan Agustus 2023	30-DEC-23	2A1840N9VRR817DA	14.533
56	Setor Jasa Giro Kec. Rembang Nov Des 2023	29-DEC-23	138BD0N9VRR81G3O	7.990
57	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Blora Bulan Desember 2023	28-DEC-23	A458F1JNFMDRKGOD	28.941
58	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Pemalang Bulan Mei s.d Desember 2023	29-DEC-23	F7CCA6U8ELS62LK7	203.189

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
59	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Rembang Bulan Agustus - Desember 2023	28-DEC-23	B46228N3EB102KJV	37.130
60	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Semarang Bulan Juli s.d Desember 2023	29-DEC-23	5B3B13CIFBILJ9LN	67.932
61	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Brebes Bulan Agustus s.d Desember 2023	29-DEC-23	1E9FE7QLUGEJKB9E	259.828
62	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Demak Bulan September s.d Desember 2023	28-DEC-23	416692G4VH0965N4	20.444
63	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	30E6548VV650V08K	70.338
64	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Desember 2023	27-DEC-23	D4DE17QLUGEJKF4S	9.493
65	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo Bulan Desember 2023	29-DEC-23	FE4E78N3EB101NMB	96.597
66	Setor Bunga Giro Kecamatan Tlogowungu dan Margoyoso Bawaslu Kab Pati Bulan Agustus - Desember 2023	13-DEC-23	8622D61QUR9QQI7I	29.036
67	Setor Bunga Giro Panwas Se Kecamatan di Kabupaten Klaten bulan Juli s.d Desember 2023	30-DEC-23	98EF82G4VH0AB5UO	285.425
68	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Kudus Bulan September s.d Desember 2023	21-DEC-23	C707B1JNFMDSRFS7	114.233
69	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Temanggung Bulan September s.d Desember 2023	29-DEC-23	F0D048N3EB103CAD	231.491
70	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar bulan Agustus s.d Desember 2023	21-DEC-23	C1D9E6U8ELS8BJR7	11.385

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
71	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	8257C3CIFBIMMUN5	13.776
72	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Surakarta bulan Agustus s.d Desember 2023	27-DEC-23	E36AE7QLUGEJN140	285.616
73	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Cilacap bulan Agustus s.d Desember 2023	28-DEC-23	CFB067QLUGEKO12K	314.545
74	Setor Bunga Giro Kecamatan se Kabupaten Magelang Bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	5823D8N3EB1142LH	92.581
75	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kota Tegal Bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	F70A10N9VRRHF24M	22.929
76	Setor Bunga Giro Panwas Kecamatan Se Kabupaten Tegal Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	2100D3CIFBIMOD4P	210.554
77	Setor Jasa Giro kecamatan Bulan Desember 2023 bawaslu Kab. Tegal	30-DEC-23	1165E8N3EB1176MF	117.228
78	Setor Bunga Giro Panwas Se Kecamatan di Kota Salatiga bulan Agustus s.d Desember 2023	30-DEC-23	925C80N9VRRH8C	104.722
JUMLAH				12.190.639

- b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.780.000 dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 41

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	Dokumen	Nominal Tarif
1	Pengembalian Kelebihan pembayaran tunjangan struktural yang telah disetorkan pada tanggal 18 Agustus 2023	18/08/2023	SP2D 0261301011054	3.780.000
Jumlah				3.780.000

- c. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp353.464.692 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 42

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian Belanja Tahun Yang Lalu atas Catatan Inspektorat	15/02/2023	91EB76U8EKU0S2BJ	2.819.250
2	Pengembalian Belanja Tahun Yang Lalu atas Catatan Inspektorat	16/02/2023	9D7997QLUFGEBHTM	658.500
3	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	27/02/2023	0D7E40N9VQTLL5JS	1.200.000
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Bawaslu Prov. Jateng belanja pemeliharaan Kend. Bermotor	27/02/2023	28A4B55DEVPJMABJ	3.771.342
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Bawaslu Prov Jateng Pekerjaan	27/02/2023	A36748N3EA35A01D	4.220.600
6	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	1A5CA6U8EKUDH6BD	1.920.000
7	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	053AA48VV578A61K	780.000
8	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	5B01D48VV578B4IQ	3.840.000
9	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	02F323CIFAKRTC07	1.275.000
10	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	BBFB148VV578B5P8	3.840.000
11	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	364B02G4VG2FHM8M	3.840.000
12	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	28/02/2023	236586U8EKUDIAFL	3.840.000
13	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	12ABF61QUQC1501I	3.840.000
14	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	ADCA348VV578BBJG	3.840.000
15	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	094251JNFLI8R05H	3.840.000
16	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	10D857QLUFIVMM98	3.840.000
17	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	9AC3E1JNFLI8R0NB	3.840.000
18	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	FBF728N3EA5C3PIJ	2.880.000
19	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	ED6E83CIFAN1LTRJ	3.840.000
20	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	C3E143CIFAKRT8PN	1.365.000
21	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	F27182G4VG2FG90I	600.000

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
22	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	532506U8EL0JB7TV	3.840.000
23	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	AE1CE8N3EA5C3JIN	3.840.000
24	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	01/03/2023	E708B55DEVPKN9UL	3.840.000
25	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	AFE7B7QLUFIVMK7U	2.880.000
26	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	10BE07QLUFIVQ93A	3.360.000
27	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	DE1291JNFLI8VRQF	3.840.000
28	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	C4D0261QUQE70RDG	3.840.000
29	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	53B3E6U8EL0JEGAJ	3.840.000
30	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	00C8D3CIFAN1PQ1B	3.840.000
31	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	DDEBB6U8EL0JD7AD	3.840.000
32	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	7A0ED0N9VQVSKQOQ	3.840.000
33	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	7F4163CIFAN1RUM7	3.840.000
34	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	02/03/2023	286346U8EKUDIFKB	3.840.000
35	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	D972961QUQC1584U	3.840.000
36	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	B659F0N9VQVTLCH2	3.840.000
37	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	8D7033CIFAN1P8NT	3.840.000
38	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	E13A155DEVRQJPK9	3.840.000
39	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	03/03/2023	4011F61QUQE84H2K	2.880.000
40	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	06/03/2023	243B90N9VQVSEQT4	3.840.000
41	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	06/03/2023	949FA7QLUFJ106NS	3.840.000
42	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	06/03/2023	2E0D53CIFAN5VDQB	3.840.000
43	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	06/03/2023	E4AE77QLUFJ0THNS	3.840.000
44	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	07/03/2023	78CAD6U8EL0OLRPT	2.880.000

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
45	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	07/03/2023	E11152G4VG4QLV18	3.400.000
46	Penerimaan Kembali Belanja Perjalanan Dinas Tahun Yang Lalu atas temuan BPK	07/03/2023	9217555DEVVRVSRSD	26.520.000
47	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	09/10/2023	B94088N3EAQEGEHR	2.707.500
48	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	10/10/2023	A807B48VV5UHKMGG	8.122.500
49	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	16/10/2023	A372A3CIFBC42867	5.415.000
50	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	20/10/2023	00F0F48VV5UO4BLG	10.830.000
51	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	24/10/2023	D4AA26U8ELM4RU39	5.415.000
52	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	25/10/2023	CD9258N3EAQTQJS5	2.707.500
53	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	25/10/2023	55A7D0N9VRLDVKRC	5.415.000
54	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	26/10/2023	5EC1E48VV5V0SU60	8.122.500
55	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	30/10/2023	C086A55DF0HHEIIB	16.245.000
56	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	30/10/2023	F54D00N9VRLJEGJE	5.415.000
57	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	30/10/2023	045CF48VV5V527NG	8.122.500
58	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	D344E1JNFM7VQHTJ	5.415.000
59	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	ABC4E61QUR3TUDS8	8.122.500
60	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	EBC0861QUR3V15KQ	8.122.500

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
61	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	6C3427QLUG8NR59A	2.707.500
62	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	B9CEF7QLUG8MMOAI	8.122.500
63	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	532B76U8ELMBE7L7	2.707.500
64	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	7EAAA7QLUG8NREAM	2.707.500
65	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	262B748VV5V6790S	5.415.000
66	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	31/10/2023	A57BE1JNFM8109V3	3.000.000
67	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	01/11/2023	916673CIFBCPRMPH	8.122.500
68	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	01/11/2023	E49EC0N9VRLKJ7BK	8.122.500
69	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	01/11/2023	03C2E6U8ELMBFFLH	5.415.000
70	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	02/11/2023	6276D3CIFBCPQFBM	8.122.500
71	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	03/11/2023	9B84F8N3EAT8ANSR	5.415.000
72	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	03/11/2023	DD56461QUR633LP5	8.122.500
73	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	23/11/2023	D97CB3CIFBFE2SIR	5.122.500
74	Penerimaan Kembali Belanja Pokja Gakkumdu Tahun Yang Lalu atas temuan Inspektorat	04/12/2023	BCAF38N3EAU02ARB	5.415.000
JUMLAH				353.464.692

d. Pendapatan Anggaran Lain-lain senilai Rp9.950.000 antara lain:

Tabel 43

Pendapatan Anggaran Lain-lain

No.	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	Pengembalian Belanja Panwaskab. Wonogiri TA 2008	08/02/2023	984D61JNFLFDM8DF	500.000
2	Pengembalian Belanja Panwaskab Wonogiri TA 2008	11/05/2023	C175F0N9VR61G2VI	500.000
3	Pengem. Belanja Bawaslu Kab. Pekalongan TA 2018 (Pokja Kec. Wonopringgo)	12/05/2023	DFA891JNFLOH693H	1.450.000
4	Pengem. Belanja Bawaslu Kab. Pekalongan TA 2018 (Pokja Kec. Karangdadap)	12/05/2023	916C955DF022Q9M3	3.800.000
5	Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA 2008	15/05/2023	8DC961JNFL0DT6MV	500.000
6	Pengembalian Belanja Panwaskab Klaten TA 2008	18/07/2023	3ED741JNFLUEN9OP	500.000
7	Pengembalian Belanja Panwaskab Wonogiri TA 2008	24/07/2023	D04708N3EAHUOA2L	200.000
8	Pengembalian Belanja Bawaslu Kec. Karanganyar Kabupaten Pekalongan TA 2018	24/07/2023	7ABF88N3EAHU06AB	1.600.000
9	Pengembalian Belanja Panwaskab. Klaten TA 2008	29/08/2023	BA16A6U8ELG3PBE7	500.000
10	Pengembalian Belanja TA 2008 Panwaslu Kab. Wonogiri	19/09/2023	9C61161QUR0ETKCG	200.000
11	Pengembalian Belanja TA 2008 Panwaslu Kab. Wonogiri	28/12/2023	73C6248VV650UV7G	200.000
JUMLAH				9.950.000

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp32.306.953.829 dan Rp30.668.755.551 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Akun	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
1	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.183.010.960	1.740.320.980	25,44
2	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	36.853	29.138	26,48
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	152.929.002	126.634.472	20,76
4	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32.267.298	22.358.240	44,32
5	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	181.720.000	166.680.000	9,02
6	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	74.799.000	60.334.000	23,97

No.	Akun	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
7	511125	Beban Tunj. PPh PNS	168.304.103	122.566.223	37,32
8	511126	Beban Tunj. Beras PNS	128.110.980	102.836.400	24,58
9	511129	Beban Uang Makan PNS	350.444.000	316.844.000	10,60
10	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	93.685.000	85.340.000	9,78
11	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	26.170.522.790	26.083.853.950	0,33
12	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	179.638.400	0	100,00
13	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.196	0	100,00
14	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.726.480	0	100,00
15	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2.168.848	0	100,00
16	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28.600.000	0	100,00
17	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	9.849.120	0	100,00
18	511628	Beban Uang Makan PPPK	39.600.000	0	100,00
19	512211	Beban Uang Lembur	21.944.000	17.775.000	23,45
20	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.310.329.622	1.823.183.148	26,72
21	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus / Kegiatan / Kinerja PPPK	170.266.177	0	100,00
Jumlah Kotor			32.306.953.829	30.668.755.551	5,34
1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(986)	(1.022)	(3,52)
2	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(1.080.000)	(8.910.000)	(87,88)
3	511332	Pengembalian Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	(10.115.760)	0	100
Jumlah Bersih			32.295.757.083	30.659.844.529	(5,34)

Selanjutnya penjelasan mengenai rincian pengembalian belanja pegawai sebesar Rp11.196.746 merupakan:

- Pembulatan Gaji PNS senilai Rp986;
- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS Rp1.080.000 sesuai dengan Bukti SPM Nomor 01862T/686328/2023 dan SP2D Nomor 230261301011054;
- Pengembalian Belanja Uang Kehormatan, Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas yang mengundurkan diri dari Bawaslu Rp10.115.760 dengan Nomor Bukti Penyetoran NTPN D5C161GAB71VUEVN dan NTB 946812366836 pada tanggal 16 Mei 2023 .

Kenaikan Beban Pegawai senilai 5,34 persen disebabkan oleh adanya penambahan pegawai dari yaitu dari pengadaan PPPK tahun 2023. Tidak ada perbedaan antara jumlah Beban Pegawai pada LO dan jumlah realisasi Belanja Pegawai pada LRA per 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp32.306.953.829.

D. 3 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.889.500 dan Rp47.944.617.

Tabel 41
Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	38.889.500	47.944.617	(18,88)
Jumlah	38.889.500	47.944.617	(18,88)

Berdasarkan saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2023 di atas, terdapat selisih antara Beban Persediaan pada Laporan Operasional sebesar Rp38.889.500 dibandingkan dengan Belanja Barang Persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp26.818.000. Penjelasan mengenai selisih tersebut dituangkan ke dalam mutasi nilai persediaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 42
Mutasi Beban Persediaan per 31 Desember 2023

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022	33.207.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian Barang Per 31 Desember 2023 (menurut LRA)	26.818.000
Reklas Masuk	24.962.260.000
Total Mutasi Tambah	25.022.285.000
Mutasi kurang:	
Persediaan Konsumsi per 31 Desember 2023	24.983.395.500
Total Mutasi Kurang	24.983.395.500
Saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2022	38.889.500

Mutasi tambah pembelian persediaan senilai Rp24.989.078.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Mutasi Tambah Persediaan per 31 Desember 2023

No.	Keterangan	Kuantitas	Nilai
1	Penanda Identitas	126438	24.962.260.000
2	Alat Tulis	47	1.334.500
3	Tinta Tulis, Tinta Stempel	11	165.000
4	Penjepit Kertas	168	2.169.500
5	Penghapus/Korektor	11	35.500
6	Buku Tulis	9	289.500

7	Ordner Dan Map	154	3.434.500
8	Penggaris	5	15.000
9	Cutter (Alat Tulis Kantor)	24	219.000
10	Alat Perekat	60	255.500
11	Staples	9	85.500
12	Isi Staples	5	47.500
13	Alat Tulis Kantor Lainnya	66	723.500
14	Kertas HVS	208	11.345.500
15	Berbagai Kertas	101	1.725.500
16	Amplop	73	1.559.500
17	Tinta/Toner Printer	31	2.927.500
18	USB/Flash Disk	3	171.000
19	Mouse	1	148.000
20	Batu Baterai	6	166.500
Jumlah			24.989.078.000

Selanjutnya, Penjelasan Rincian Mutasi Kurang Barang Konsumsi di atas dijelaskan pada Daftar Persediaan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 44
Daftar Persediaan per 31 Desember 2023

No.	Keterangan	Kuantitas	Nilai
1	Penanda Identitas (Kaos PTPS)	117.299	4.046.815.500
2	Penanda Identitas (Seragam PTPS)	117.299	19.295.685.500
3	Penanda Identitas (Seragam PKD)	8.563	1.275.887.000
4	Penanda Identitas (Seragam Panwascam)	1.728	343.872.000
5	Bolpoint 0.5 (Dus)	6	156.000
6	Bolpoint 1.0 (Dus)	4	144.000
7	Paper Clip (Dus)	8	264.000
8	Binder Clip (Dus)	1	35.000
9	Isi Stapler Kecil (Dus)	3	53.000
10	Isi Stapler Besar (Dus)	1	36.000
11	Lem	10	30.000
12	Stip Penghapus	5	12.500
13	Kardus Arsip	2.915	20.405.000
Jumlah			24.983.395.500

Dengan demikian diperoleh angka Beban Barang Konsumsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.889.500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Beban Barang Konsumsi per 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Kuantitas	Rupiah
117111	Barang Konsumsi		
1010301001	Alat Tulis	65	2.089.500
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	11	165.000
1010301003	Penjepit Kertas	298	2.524.500
1010301004	Penghapus/Korektor	18	66.500
1010301005	Buku Tulis	9	289.500
1010301006	Ordner Dan Map	184	4.153.000
1010301007	Penggaris	5	15.000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	24	219.000
1010301010	Alat Perekat	58	251.000
1010301012	Staples	9	85.500
1010301013	Isi Staples	7	82.500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	69	747.500
1010302001	Kertas HVS	225	12.263.500
1010302002	Berbagai Kertas	118	2.000.000
1010302004	Amplop	83	1.779.500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	610	4.270.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	59	5.622.500
1010304006	USB/Flash Disk	5	283.000
1010304010	Mouse	1	148.000
1010306010	Batu Baterai	14	394.500
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	20	960.000
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	5	480.000
Jumlah		1.897	38.889.500

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp353.648.042.050 dan Rp62.972.829.789. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian beban barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	27.050.222.052	41.943.989.371	(35,51)

Akun	Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.006.101	51.411.681	(64,98)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.655.394.000	1.254.150.000	31,99
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	457.995.450	1.085.187.345	(57,80)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	87.288.364	(100,00)
521211	Beban Bahan	55.976.771.458	5.673.194.339	886,69
521213	Beban Honor Output Kegiatan	225.299.430.000	3.784.020.000	5.853,97
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.372.498.456	149.342.400	1.488,63
522111	Beban Langganan Listrik	1.644.611.120	837.416.745	96,39
522112	Beban Langganan Telepon	37.297.495	33.886.506	10,07
522113	Beban Langganan Air	156.090.229	83.736.249	86,41
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	636.455	(100,00)
522131	Beban Jasa Konsultan	47.341.500	0	100,00
522141	Beban Sewa	33.652.187.489	5.310.536.334	533,69
522151	Beban Jasa Profesi	3.716.975.000	2.660.050.000	39,73
522191	Beban Jasa Lainnya	1.563.221.700	17.000.000	9.095,42
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	984.000	(100,00)
JUMLAH		353.648.042.050	62.972.829.789	461,58

Selanjutnya. Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 461,58 persen. Terdapat perbedaan antara jumlah Beban Barang dan Jasa pada LO sejumlah Rp353.648.042.050 dibandingkan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA sejumlah Rp354.752.986.461, sehingga per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp1.104.944.411 yang dijelaskan dengan mutasi beban barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 47
Mutasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

Jumlah Belanja	
Belanja Barang Operasional	29.222.060.495
Belanja Barang Non Operasional	283.555.903.914
Belanja Jasa	40.920.802.485
Belanja barang dan Jasa yang masih harus dibayar	162.527.068
Sewa Dibayar dimuka TAYL	891.692.499
Total Belanja Barang dan Jasa	354.752.986.461
Mutasi	
Jurnal Koreksi LS RDP	304.000
Sewa Dibayar dimuka	995.047.499
Jurnal Balik Listrik,Air,Telepon dan Internet 2022	109.592.912

Jumlah Mutasi	1.104.944.411
Jumlah Beban Barang dan Jasa (Belanja Barang Jasa - Jumlah Mutasi)	353.648.042.050

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.939.695.620 dan Rp3.030.366.079.

Tabel 48
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.515.975.981	1.676.247.461	50,09
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13.375.000	0	100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.410.344.639	1.354.118.618	4,15
Jumlah	3.939.695.620	3.030.366.079	30,00

Pada tahun 2023, terjadi kenaikan Beban Pemeliharaan sejumlah 30%. Kenaikan beban pemeliharaan gedung dan bangunan disebabkan adanya biaya perbaikan gedung dan bangunan agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kegiatan operasional. Sedangkan kenaikan beban pemeliharaan peralatan dan mesin disebabkan bertambahnya jumlah peralatan dan mesin sehingga biaya pemeliharaannya cenderung naik dibandingkan tahun 2022.

Terdapat perbedaan antara jumlah Beban Pemeliharaan pada LO per 31 Desember 2023 sejumlah Rp3.939.695.620 dibandingkan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan LRA sejumlah Rp4.326.333.480, yaitu selisih sebesar Rp386.637.860 yang dijelaskan dengan mutasi beban pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 49
Mutasi Beban Pemeliharaan Gedung, Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Mutasi Tambah	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.902.613.841
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13.375.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.410.344.639
Total Mutasi Tambah	4.326.333.480
Mutasi kurang:	

Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	386.637.860
Saldo Beban Per 31 Desember 2023	3.939.695.620

Selanjutnya penjelasan mengenai jumlah pemeliharaan baik pemeliharaan gedung maupun pemeliharaan mesin sebagai berikut: Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, diatur bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi BMN adalah sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi berupa peralatan dan mesin seperti yang dapat kita lihat bahwa pada realisasi belanja pemeliharaan gedung dan peralatan mesin lebih dari lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun keadaan ini disebabkan karena pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdapat 35 Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satker tersendiri, sehingga nilai dari belanjanya tergabung menjadi satu kedalam nilai belanja Bawaslu Provinsi dan menimbulkan jumlah belanja lebih dari 1.000.000 (satu juta rupiah).

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp90.414.481.750 dan Rp28.492.684.425.

Tabel 50
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	24.476.686.784	12.183.931.415	100,89%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.799.143.530	3.171.298.750	1.218,04%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.653.729.942	12.686.871.785	62,80%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.484.921.494	450.582.475	673,43%
Jumlah	90.414.481.750	28.492.684.425	217,32%

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sejumlah 217,32 persen jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Terdapat perbedaan antara jumlah Beban Perjalanan Dinas pada LO sejumlah Rp90.414.481.750 dibandingkan jumlah realisasi Beban Perjalanan Dinas pada LRA sejumlah Rp93.063.971.020, yaitu selisih sebesar Rp2.649.489.270. Selisih tersebut disebabkan adanya pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp2.460.695.070 dan pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp188.794.200. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 51
Mutasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023

Mutasi Tambah	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.476.686.784
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.259.838.600
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.842.524.142
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.484.921.494
Total Mutasi Tambah	93.063.971.020
Mutasi kurang:	
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.460.695.070
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	188.794.200
Total Mutasi Kurang	2.649.489.270
Saldo Beban per 31 Desember 2023	90.414.481.750

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.669.358.735 dan Rp3.883.442.314. Rincian Beban penyusutan dan amortasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 52
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.429.277.065	3.615.334.666	(5,18)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.413.130	0	100
Beban Amortisasi Software	140.265.746	261.727.838	(46,40)
Beban Amortisasi Lisensi	182.984	0	100
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	38.219.810	6.379.810	499,07
Jumlah	3.669.358.735	3.883.442.314	(5,51)

Terdapat selisih antara Beban Pada LO dibandingkan dengan Penyusutan pada Neraca. Penjelasan mengenai selisih tersebut dituangkan ke dalam mutasi nilai Beban Penyusutan. Mutasi nilai beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 53
Mutasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023

Mutasi Tambah	
----------------------	--

Mutasi Tambah:	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2023	(26.221.753.688)
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Digunakan 2023	(505.397.804)
Akumulasi Amortisasi 2023	(940.756.250)
Total Mutasi Tambah	(27.667.907.742)
Mutasi kurang:	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2022	(22.643.340.287)
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Digunakan 2022	(554.901.200)
Akumulasi Amortisasi 2022	(800.307.520)
Total Mutasi Kurang	(23.998.549.007)
Saldo Per 31 Desember 2023	(3.669.358.735)

D. 8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.098.350 dan Rp56.448.997. Surplus dari kegiatan non operasional merupakan selisih antara Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp180.275.000 dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp196.373.350 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp180.275.000 merupakan Beban Pelepasan Aset yang timbul akibat adanya Hibah ATR sebesar Rp179.785.000 dan Pelepasan Peralatan Mesin sebesar Rp490.000
2. Penjelasan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp196.373.350 merupakan pendapatan yang bersumber dari pengembalian belanja yang bersumber dari:
 1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.780.000;
 2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu - 187.593.350.
 3. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp5.000.000 merupakan reward dari pihak ke 3 yaitu telkomsel kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo sesuai dengan Berita acara serah terima barang Nomor K.Tel.272/KU/000/4E1H0000/2023 tanggal 6 Juni 2023 berupa LCD proyektor.

Selanjutnya, perbandingan surplus kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 54
Perbandingan Surplus Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Surplus Kegiatan Non Operasional	16.098.350	56.448.997	(71,48)
Jumlah	16.098.350	56.448.997	(71,48)

D. 9 Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D. 10 Surplus/Defisit LO

Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar minus Rp483.979.182.495 dan minus Rp129.034.573.778. Defisit LO mengalami kenaikan sebesar 275,08 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Presentase kenaikan surplus pada LO sebagai berikut:

Tabel 55
Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan	22.140.639	5.000.000	342,81
Beban	484.017.421.484	129.096.022.775	274,93
Defisit dari kegiatan Operasional	(483.995.280.845)	(129.091.022.775)	274,93
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	16.098.350	56.448.997	(71,48)
Defisit-LO	(483.979.182.495)	(129.034.573.778)	275,08

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.215.850.465 dan Rp7.328.721.802 .

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp483.979.182.495 dan Rp129.034.573.778. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. Surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Non Revaluasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.560.770 dan Rp0.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut, Koreksi kurang Nilai Aset Non Revaluasi berasal dari hasil validasi dan verifikasi pengelola BMN sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Barang Nomor 1109/PL.08/JT/12/2023 tentang koreksi pencatatan Barang Milik Negara (BMN) berupa penghapusan atas aset lisensi, hal ini disebabkan bahwa perpanjangan lisensi berupa canva tersebut tidak memenuhi kaidah aset tetap.

E.3.2 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp699.939.610.277 dan Rp 126.897.027.441. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda, baik internal KL antar KL antar BUN, maupun KL dengan BUN.

Tabel 56
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik (Turun)
Ditagihkan ke Entitas Lain	487.884.486.533	126.958.476.438	74%
Diterima dari Entitas Lain	(379.385.331)	(61.448.997)	84%
Transfer Masuk	5.884.047.075	0	100%

Pengesahan Hibah Langsung	206.550.462.000	0	100%
Jumlah	699.939.610.277	126.897.027.441	74%

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp487.884.486.533 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Tabel 57
Ditagihkan ke Entitas Lain

No.	Akun	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	51	Belanja Pegawai	32.306.953.829
2.	52	Belanja Barang	448.079.762.264
3.	53	Belanja Modal	7.497.770.440
		Jumlah	487.884.486.533

2. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Satuan Kerja yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar minus Rp379.385.331 merupakan pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023. Transaksi Antar Entitas tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 58
Diterima dari Entitas Lain

Uraian	2023	2022
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	12.190.639	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.780.000	20.790.270
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	353.464.692	14.658.728
Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.950.000	5.000.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	20.999.999
Jumlah Belanja	379.385.331	61.448.997

3. Transfer Masuk

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.884.047.075 yang dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 59
Transfer Masuk

Nomor	Keterangan	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	34.500.000
2	Tanah	5.132.877.000
3	Gedung dan Bangunan	1.531.806.000
4	Jumlah (4= 1+2+3)	6.699.183.000
5	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	815.135.925
6	Jumlah (5)	815.135.925
7	Nilai Transfer Masuk (7=4+6)	5.884.047.075

4. Pengesahan Hibah Langsung

Transaksi pengesahan hibah langsung merupakan, pengesahan atas pendapatan yang bersumber dari dana hibah pemerintah daerah yang diterima selama tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60
Pengesahan Hibah Langsung

No.	Bawaslu	Nama Bank	Tanggal Terima Transfer	Nomor SP2D	Nilai
1	Provinsi Jawa Tengah	Bank Jateng	07/12/2023	230260000000036	77.487.148.000
2	Kab. Banjarnegara	Bank Jateng	01/12/2023	230260000000050	3.261.650.800
3	Kab. Banyumas	Bank Jateng	22/11/2023	230260000000055	8.239.741.200
4	Kab. Batang	Bank Jateng	22/11/2023	230260000000031	5.000.000.000
5	Kab. Blora	Bank Jateng	02/12/2023	230260000000059	3.866.690.800
6	Kab. Boyolali	Bank Jateng	24/11/2023	230260000000054	500.000.000
7	Kab. Brebes	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000046	4.874.233.200
8	Kab. Cilacap	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000030	5.000.000.000
9	Kab. Demak	Bank Jateng	10/11/2023	230260000000062	4.166.917.600
10	Kab. Grobogan	Bank Jateng	30/11/2023	230260000000035	4.940.800.000
11	Kab. Jepara	Bank Jateng	30/11/2023	230260000000042	2.834.337.200
12	Kab. Karanganyar	Bank Jateng	27/11/2023	230260000000029	2.800.000.000
13	Kab. Kebumen	Bank Jateng	12/12/2023	230260000000044	4.067.832.000
14	Kab. Kendal	BRI	17/11/2023	230260000000051	5.200.000.000
15	Kab. Klaten	Bank Jateng	02/12/2023	230260000000038	6.400.000.000
16	Kab. Kudus	Bank Jateng	22/11/2023	230260000000061	3.550.593.000
17	Kab. Magelang	Bank Jateng	24/11/2023	230260000000057	5.410.622.000
18	Kab. Pekalongan	Bank Jateng	11/12/2023	230260000000037	500.000.000
19	Kab. Pemalang	BRI	15/12/2023	230260000000058	300.000.000
20	Kab. Purbalingga	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000049	3.200.000.000
21	Kab. Purworejo	Bank Jateng	30/11/2023	230260000000053	4.414.396.000

No.	Bawaslu	Nama Bank	Tanggal Terima Transfer	Nomor SP2D	Nilai
22	Kab. Rembang	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000043	2.400.000.000
23	Kab. Semarang	Bank Jateng	21/11/2023	230260000000032	5.040.000.000
24	Kab. Sragen	Bank Jateng	30/11/2023	230260000000056	4.320.000.000
25	Kab. Sukoharjo	Bank Jateng	27/11/2023	230260000000041	4.000.000.000
26	Kab. Tegal	Bank Jateng	12/12/2023	230260000000060	5.400.000.000
27	Kab. Temanggung	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000040	3.478.611.600
28	Kab. Wonogiri	Bank Jateng	09/11/2023	230260000000034	4.467.300.000
29	Kab. Wonosobo	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000052	3.825.600.000
30	Kota Magelang	Bank Jateng	27/11/2023	230260000000048	1.410.580.000
31	Kota Pekalongan	Bank Jateng	05/12/2023	230260000000039	880.000.000
32	Kota Salatiga	Bank Jateng	20/11/2023	230260000000045	1.562.400.000
33	Kota Semarang	Bank Jateng	28/11/2023	230260000000033	6.873.570.800
34	Kota Surakarta	Bank Jateng	04/12/2023	230260000000047	4.458.512.800
35	Kota Tegal	Bank Jateng	01/12/2023	230260000000028	2.418.925.000
Jumlah					206.550.462.000

E.3 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp215.957.867.012 dan minus Rp2.112.871.337. Selanjutnya rincian kenaikan/penurunan pada ekuitas disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 61
Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Defisit LO	(483.979.182.495)	(129.034.573.778)	275,08
Koreksi Nilai Persediaan	0	24.675.000	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(2.560.770)	0	(100,00)
Transaksi Antar Entitas	699.939.610.277	126.897.027.441	451,58
Jumlah Kenaikan / Penurunan Ekuitas	215.957.867.012	(2.112.871.337)	10.321,06

Kesimpulan dari tabel di atas adalah pada 31 Desember 2023 terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp215.957.867.012 sehingga ekuitas akhir pada 31 Desember 2023 senilai Rp221.173.717.477.

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp221.173.717.477 dan Rp5.215.850.465. Nilai ekuitas akhir merupakan

akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp5.215.850.465 dan kenaikan ekuitas sebesar Rp215.957.867.012. Perbandingan ekuitas akhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 62
Perbandingan Ekuitas 31 Desember 2023 dan 2022

Ekuitas	2023 (Rp)	2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Ekuitas Akhir	221.173.717.477	5.215.850.465	4.140,42
Jumlah Ekuitas Akhir	221.173.717.477	5.215.850.465	4.140,42

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat pemungutan Suara. Berikut disampaikan tabel susunan struktur organisasi sesuai dengan SOTK tersebut:

Tabel 63
Data Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Kartini Tjandra Lestari. S.H.. M.M.	Kepala Sekretariat	
2	Drs. Setyo Pramudi	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Pengawasan Pemilu
3	Sadhu Sudiyarto. S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
4	Tri Adiyanto Baay. S.STP.. M.Ec.Dev.	Kepala Bagian Administrasi	Administrasi
5	Bayu Indra Permana. S.H.. M.H.	Plt. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi / Analis Hukum Ahli Muda	Hukum, Humas, Data dan Informasi / Fungsional
6	Inti Priswari. S.IP.. M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda	Fungsional
7	Guritno Ari Wibowo. S.Si.. M.Pd	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Fungsional
8	Muhammad Syaiful Mujib. S.E.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Fungsional

F.2 Pengungkapan Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Daftar Tim Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 64
Data Pengelola Keuangan

No	Nama	Jabatan
1	Kartini Tjandra Lestari. SH. MM	KPA
2	Tri Adiyanto Baay. S.STP.. M.Ec.Dev.	PPK
3	Sriyadi	BP
4	Novi Wulandari. S.Ak.	PPSPM
5	Nurma Anggi Pramesti. S.Tr.Ak.	Petugas SAI
6	Latief Yulianto. A.Md.	Petugas SAI
7	Husnul Faizah. A.Md.	Petugas SAI

Daftar anggota staf pengelola keuangan pembantu kuasa pengguna anggaran di lingkungan sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa tengah tahun anggaran 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 65
Daftar Pengelola Keuangan Pembantu KPA

No	Nama	Jabatan
1	Ari Dwi Saputra. S.Pd.	Staf Pengelola Keuangan
2	Suciyati	Staf Pengelola Keuangan
3	Aniatus Solekhah. A.Md	Staf Pengelola Keuangan

Daftar anggota staf pengelola keuangan pembantu pejabat pembuat komitmen di lingkungan sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa tengah tahun anggaran 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 66
Daftar Pengelola Keuangan Pembantu PPK

No	Nama	Jabatan
1	Anggie Desta Ervita. S.AP	Staf Pengelola Keuangan
2	Arista Yoga Feriadi. SE	Staf Pengelola Keuangan

Selanjutnya selama periode berjalan terdapat perubahan PPK di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang semula Bashory. S.H.. S.T.. M.M. menjadi Tri Adiyanto Baay. S.STP.. M.Ec.Dev.

F.3 Pengungkapan Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Rincian Pagu Anggaran. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 67
Rincian Alokasi Anggaran Prioritas Nasional PN

No.	Nama Satker	Kegiatan Prioritas Nasional	KRO	Pagu	Realisasi	%	Target
1	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	36.377.616.000	26.503.714.928	73%	1
2	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad- Hoc	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	331.615.626.000	284.753.714.376	86%	18.313
3	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	BKC Pemantauan lembaga (laporan)	2.680.453.000	1.737.641.116	65%	180
4	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	103.172.101.000	72.801.945.543	71%	2
5	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6848 Pengawasan Logistik	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	4.570.649.000	-218.560.692	-5%	1
6	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6848 Pengawasan Logistik	QCE Penanganan Perkara (Perkara, Berkas Perkara)	670.538.000	176.970.250	26%	1
7	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	7.380.497.000	6.744.645.450	91%	1
8	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	QCE Penanganan Perkara (Perkara, Berkas Perkara)	1.538.445.000	569.921.216	37%	1
9	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6842 Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD,	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	5.992.307.000	2.854.005.883	48%	1

No.	Nama Satker	Kegiatan Prioritas Nasional	KRO	Pagu	Realisasi	%	Target
		DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota					
10	686328 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	6842 Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	QCE Penanganan Perkara (Perkara, Berkas Perkara)	744.146.000	155.184.648	21%	1

F.4 Pengungkapan Lain-lain

1. Penggunaan Aplikasi SAKTI

Di awal tahun 2022 terdapat perubahan aplikasi yang digunakan dalam mendukung pengelolaan keuangan yang sebelumnya menggunakan aplikasi SAS. SAIBA. SIMAK- BMN dan saat ini seluruh aplikasi tersebut sudah terintegrasi menjadi aplikasi SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai proses penganggaran. pelaksanaan. sampai dengan pelaporan. Berikut daftar pengguna aplikasi SAKTI yang ditetapkan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 014/PR.03.00/JT/04/2021 tentang Penetapan User Pejabat.Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. dengan data sebagai berikut:

Tabel 68
User Pejabat. Operator. dan Administrator Aplikasi SAKTI

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan	Kategori User
1	Kartini Tjandra Lestari. S.H..M.M.	KPA	Approval
3	Novi Wulandari. S.Ak	PPSPM	Approval
4	Sriyadi	Bendahara Pengeluaran	Pembayaran
5	Nurma Anggi Pramesti. S.Tr.Ak.	Staf SAI	Operator Anggaran
6	Latief Yulianto. A.Md.	Staf SAI	Operator Aset
7	Husnul Faizah. A.Md.	Staf SAI	Operator GLP

2. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan migrasi rekening ke *virtual account* pada 31 Maret 2021. selanjutnya data rekening per tanggal 31 Desember 2022 sejumlah 36 rekening. yang terdiri dari 1 (satu) rekening

Bendahara Pengeluaran di Bawaslu Provinsi dan 35 rekening penampungan anggaran APBN Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan menggunakan Bank BRI dan Cabang A.Yani Semarang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 69
Data Virtual Account

No.	Nomor Rekening	Nama
1	652296863281000	Bpg 026 Bawaslu Prov. Jateng
2	652296863281001	Bpp 026 Panwas Kab Banjarnegara
3	652296863281002	Bpp 026 Panwas Kab Banyumas
4	652296863281003	Bpp 026 Panwas Kab Batang
5	652496863281004	Bpp 026 Panwas Kab Blora
6	652296863281005	Bpp 026 Panwas Kab Boyolali
7	652296863281006	Bpp 026 Panwas Kab Brebes
8	652296863281007	Bpp 026 Panwas Kab Cilacap
9	652296863281008	Bpp 026 Panwas Kab Demak
10	652296863281009	Bpp 026 Panwas Kab Grobogan
11	652296863281010	Bpp 026 Panwas Kab Jepara
12	652296863281011	Bpp 026 Panwas Kab Karanganyar
13	652496863281012	Bpp 026 Panwas Kab Kebumen
14	652296863281013	Bpp 026 Panwas Kab Kendal
15	652296863281014	Bpp 026 Panwas Kab Klaten
16	652296863281015	Bpp 026 Panwas Kab Kudus
17	652296863281016	Bpp 026 Panwas Kab Magelang
18	652296863281017	Bpp 026 Panwas Kab Pati
19	652296863281018	Bpp 026 Panwas Kab Pekalongan
20	652296863281019	Bpp 026 Panwas Kab Pemalang
21	652496863281020	Bpp 026 Panwas Kab Purbalingga
22	652296863281021	Bpp 026 Panwas Kab Purworejo
23	652296863281022	Bpp 026 Panwas Kab Rembang
24	652296863281023	Bpp 026 Panwas Kab Semarang
25	652296863281024	Bpp 026 Panwas Kab Sragen
26	652296863281025	Bpp 026 Panwas Kab Sukoharjo
27	652296863281026	Bpp 026 Panwas Kab Tegal
28	652296863281027	Bpp 026 Panwas Kab Temanggung
29	652296863281028	Bpp 026 Panwas Kab Wonogiri
30	652296863281029	Bpp 026 Panwas Kab Wonosobo
31	652296863281030	Bpp 026 Panwas Kota Magelang
32	652296863281031	Bpp 026 Panwas Kota Pekalongan
33	652296863281032	Bpp 026 Panwas Kota Salatiga
34	652296863281033	Bpp 026 Panwas Kota Semarang
35	652296863281034	Bpp 026 Panwas Kota Surakarta
36	652296863281035	Bpp 026 Panwas Kota Tegal

Selain itu, untuk mendukung pengelolaan keuangan dalam tahapan Pemilihan Umum 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai Rekening Dana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 70
Data Rekening Dana Pemilu

No	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	060901001604302	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP
2	000401002472302	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. BANJARNEGARA
3	007701002667308	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. BANYUMAS
4	015601002545300	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. BATANG
5	001001002303306	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. BLORA
6	017301002487302	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. BOYOLALI
7	001401002396305	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. BREBES
8	010601003479303	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. CILACAP
9	001601002826308	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. DEMAK
10	007601004279301	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. GROBOGAN
11	002201002803307	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. JEPARA
12	014901002120303	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. KARANGANYAR
13	003201002890307	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. KEBUMEN
14	003401002475309	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. KENDAL
15	003501003486307	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. KLATEN
16	003801002947302	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. KUDUS
17	004801002709309	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. MAGELANG
18	006601004424301	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. PATI
19	202801000800301	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. PEKALONGAN
20	006901002270300	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. PEMALANG
21	007401002203306	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. PURBALINGGA
22	007801001760301	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. PURWOREJO
23	014201002305303	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. REMBANG
24	032701002284303	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. SEMARANG
25	014001002706307	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. SRAGEN
26	051101001901309	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. SUKOHARJO
27	066101001945306	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. TEGAL
28	010201002113306	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. TEMANGGUNG
29	015801002132309	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. WONOGIRI
30	011201002408306	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KAB. WONOSOBO
31	004801002711306	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KOTA MAGELANG
32	006801002753304	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KOTA PEKALONGAN
33	008101002100305	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KOTA SALATIGA
34	060901001611309	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KOTA SEMARANG
35	033401002337301	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KOTA SURAKARTA
36	010101002798306	RPL 026 PS BAWASLU PROV. JATENG UNTUK RDP KOTA TEGAL

Selanjutnya, rekening yang digunakan untuk menampung dana hibah terdiri atas tiga rekening per provinsi atau kabupaten/kota. Tiga rekening itu antara lain rekening PDHL, PDH Pilgub, dan PDH Pilbup/Pilwalkot yang dijelaskan pada ketiga tabel sebagai berikut:

Tabel 71
Data Rekening Hibah PDHL

No	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	5001206863282401	RPL026 PDHL PILGUB JATENG
2	5001206863282402	RPL026 PDHL PILBUP BANJARNGR
3	5001206863282403	RPL026 PDHL BILBUP BANYUMAS
4	5001206863282404	RPL026 PDHL PILBUP BATANG
5	5001206863282405	RPL026 PDHL PILBUP BLORA
6	5001206863282406	RPL026 PDHL PILBUP BOYOLALI
7	5001206863282407	RPL026 PDHL PILBUP BREBES
8	5001206863282408	RPL026 PDHL PILBUP CILACAP
9	5001206863282409	RPL026 PDHL PILBUP DEMAK

No	Nomor Rekening	Nama Rekening
10	5001206863282410	RPL026 PDHL PILBUP GROBOGAN
11	5001206863282411	RPL026 PDHL PILBUP JEPARA
12	5001206863282412	RPL026 PDHL PILBUP KRGANYAR
13	5001206863282413	RPL026 PDHL PILBUP KEBUMEN
14	654256863282401	RPL026 PDHL PILBUP KENDAL
15	5001206863282414	RPL026 PDHL PILBUP KLATEN
16	5001206863282415	RPL026 PDHL PILBUP KUDUS
17	5001206863282416	RPL026 PDHL PILBUP MAGELANG
18	5001206863282417	RPL026 PDHL PILBUP KAB PATI
19	5001206863282418	RPL026 PDHL PILBUP PEKALGN
20	654256863282402	RPL026 PDHL PILBUP PEMALANG
21	5001206863282419	RPL026 PDHL PILBUP PURBALG
22	5001206863282420	RPL026 PDHL PILBUP PURWORJ
23	5001206863282421	RPL026 PDHL PILBUP REMBANG
24	5001206863282422	RPL026 PDHL PILBUP SEMARANG
25	5001206863282423	RPL026 PDHL PILBUP SRAGEN
26	5001206863282424	RPL026 PDHL PILBUP SUKOHARJO
27	5001206863282425	RPL026 PDHL PILBUP TEGAL
28	5001206863282426	RPL026 PDHL PILBUP TEMANGG
29	5001206863282427	RPL026 PDHL PILBUP WONOGIRI
30	5001206863282428	RPL026 PDHL PILBUP WONOSOBO
31	5001206863282429	RPL026 PDHL PILKOT MAGELANG
32	5001206863282430	RPL026 PDHL PILKOT PEKALOGN
33	5001206863282431	RPL026 PDHL PILKOT SALATIGA
34	5001206863282432	RPL026 PDHL PILKOT SEMARANG
35	5001206863282433	RPL026 PDHL PILKOT SURAKT
36	5001206863282434	RPL026 PDHL PILKOT TEGAL

Tabel 72
Data Rekening Hibah PDH Pilgub

No	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	5001106863282501	RPL026 PDH PILGUB KAB BJNGR
2	5001106863282500	RPL026 PDH PILGUB KAB BNYMS
3	5001106863282503	RPL026 PDH PILGUB KABBATANG
4	5001106863282504	RPL026 PDH PILGUB KAB BLORA
5	5001106863282505	RPL026 PDH PILGUB KAB BOYOLL
6	5001106863282506	RPL026 PDH PILGUB KAB BREBES
7	5001106863282507	RPL026 PDH PILGUB KAB CLCP
8	5001106863282508	RPL026 PDH PILGUB KAB DEMAK
9	5001106863282509	RPL026 PDH PILGUB KAB GRBKN
10	5001106863282510	RPL026 PDH PILGUB KABJEPARA
11	5001106863282511	RPL026 PDH PILGUB KAB KRNYR
12	5001106863282512	RPL026 PDH PILGUB KAB KEBMN
13	5001106863282513	RPL026 PDH PILGUB KABKENDAL
14	5001106863282514	RPL026 PDH PILGUB KABKLATEN
15	5001106863282515	RPL026 PDH PILGUB KAB KUDUS
16	5001106863282516	RPL026 PDH PILGUB KAB MAGLG
17	5001106863282517	RPL026 PDH PILGUB KAB PATI
18	5001106863282518	RPL026 PDH PILGUB KAB PKLGN
19	5001106863282519	RPL026 PDH PILGUB KAB PEMLNG
20	5001106863282520	RPL026 PDH PILGUB KABPURBLG
21	5001106863282521	RPL026 PDH PILGUB KAB PWRJ
22	5001106863282522	RPL026 PDH PILGUB KAB RMBNG
23	5001106863282523	RPL026 PDH PILGUB KAB SMRG
24	5001106863282524	RPL026 PDH PILGUB KABSRAKEN
25	5001106863282525	RPL026 PDH PILGUB KAB SKHJ
26	5001106863282526	RPL026 PDH PILGUB KABTEGAL

27	5001106863282527	RPL026 PDH PILGUB KAB TEMGG
28	5001106863282528	RPL026 PDH PILGUB KAB WONOGR
29	5001106863282529	RPL026 PDH PILGUB KAB WONOSB
30	5001106863282530	RPL026 PDH PILGUB KT MAGELG
31	5001106863282531	RPL026 PDH PILGUB KT PKLGN
32	5001106863282532	RPL026 PDH PILGUB KT SALATG
33	5001106863282533	RPL026 PDH PILGUB KT SMRG
34	5001106863282534	RPL026 PDH PILGUB KT SURAKT
35	5001106863282535	RPL026 PDH PILGUB KT TEGAL

Tabel 73
Data Rekening Hibah PDH Pilbup/Pilwalkot

No	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	5001106863282536	RPL026 PDH PILBUP BANJARNGR
2	5001106863282537	RPL026 PDH PILBUP BANYUMAS
3	5001106863282538	RPL026 PDH PILBUP BATANG
4	5001106863282539	RPL026 PDH PILBUP BLORA
5	5001106863282540	RPL026 PDH PILBUP BOYOLALI
6	5001106863282541	RPL026 PDH PILBUP BREBES
7	5001106863282542	RPL026 PDH PILBUP CILACAP
8	5001106863282543	RPL026 PDH PILBUP DEMAK
9	5001106863282544	RPL026 PDH PILBUP GROBOGAN
10	5001106863282545	RPL026 PDH PILBUP JEPARA
11	5001106863282546	RPL026 PDH PILBUP KRGANYAR
12	5001106863282547	RPL026 PDH PILBUP KEBUMEN
13	654266863282501	RPL026 PDH PILBUP KENDAL
14	5001106863282548	RPL026 PDH PILBUP KLATEN
15	5001106863282549	RPL026 PDH PILBUP KUDUS
16	5001106863282550	RPL026 PDH PILBUP MAGELANG
17	5001106863282551	RPL026 PDH PILBUP KAB PATI
18	5001106863282552	RPL026 PDH PILBUP PEKALGN
19	654266863282502	RPL026 PDH PILBUP PEMALANG
20	5001106863282553	RPL026 PDH PILBUP PURBALG
21	5001106863282554	RPL026 PDH PILBUP PURWOREJO
22	5001106863282555	RPL026 PDH PILBUP REMBANG
23	5001106863282556	RPL026 PDH PILBUP SEMARANG
24	5001106863282557	RPL026 PDH PILBUP SRAGEN
25	5001106863282558	RPL026 PDH PILBUP SUKOHARJO
26	5001106863282559	RPL026 PDH PILBUP TEGAL
27	5001106863282560	RPL026 PDH PILBUP TEMANGG
28	5001106863282561	RPL026 PDH PILBUP WONOGIRI
29	5001106863282562	RPL026 PDH PILBUP WONOSOBO
30	5001106863282563	RPL026 PDH PILKOT MAGELANG
31	5001106863282564	RPL026 PDH PILKOT PEKALOGN
32	5001106863282565	RPL026 PDH PILKOT SALATIGA
33	5001106863282566	RPL026 PDH PILKOT SEMARANG
34	5001106863282567	RPL026 PDH PILKOT SURAKARTA
35	5001106863282568	RPL026 PDH PILKOT TEGAL

3. Tindak Lanjut BPK dan Inspektorat

Berdasarkan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK dan BPKP Pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada 31 Desember 2023. Terdapat catatan hal sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2009
 - 1) Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan pada Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan secara tidak tertib dan tidak sesuai

ketentuan pada Panwaslu Kabupaten Wonogiri sebesar Rp76.053.153 Sampai dengan Akhir Desember sudah ditindaklanjuti sebesar Rp13.600.000. Maka Sisa saldo sebesar Rp62.453.153.

- 2) Penerimaan Negara kurang dipungut dan/atau disetor ke Kas Negara senilai Rp32.556.000 Pada Panwaslu Kabupaten Klaten. Dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp21.778.000. Maka Sisa saldo sebesar Rp10.778.000.
- 3) Pengelolaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Panwaslu Kabupaten Brebes sebesar Rp34.000.000. Sampai dengan Januari 2022 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut dengan bersurat kepada instansi induk terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada waktu itu yaitu Sdr. Drs. Ari Arjunanto. Diperoleh hasil surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes Nomor 800/0029/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Jawaban Permohonan Informasi Pegawai Negeri Sipil A.N Ari Arjunanto. Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Sdr. Ari Arjunanto telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mangkir kerja selama 86 Hari.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018

- 1) Terdapat Temuan Pemberian Honorarium Kelompok kerja (Pokja) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp8.840.000. Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp8.840.000 dengan nomor Ref: SWD/2019-03-11/033765 tanggal 11/03/2019.
- 2) Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Bawaslu Kabupaten Pekalongan Belum Sesuai Ketentuan Sebesar Rp6.393.000. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp6.393.000. Sehingga sudah tuntas.
- 3) Pokja-pokja yang personil timnya hanya berisikan pihak internal Bawaslu, yaitu Bawaslu Kabupaten Pekalongan Rp17.055.000 dan sudah ditindaklanjuti sebesar Rp11.535.000 maka sisa saldo Rp4.520.000. Tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pekalongan melampirkan bukti pertanggungjawaban honorarium Pokja yang belum lengkap. Selanjutnya. Menunggu Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Tim BPK Semester II Tahun 2021.

c. Laporan Hasil Reviu BPKP Tahun 2019

Dalam laporan ikhtisar Laporan Pengawasan Inspektorat Utama Bawaslu Semester I Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki saldo temuan sebesar Rp21.771.750 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPKP Provinsi Jawa tengah.

bahwa untuk Laporan hasil reuiu BPKP Tahun 2019 sudah Tuntas.

d. Laporan Hasil Reviu BPK 2021

Dalam laporan ikhtisar Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2021 terdapat Catatan atas kelebihan pembayaran Swab Antigen pada Peserta SKPP senilai Rp900.000. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengembalian sejumlah Rp900.000 dengan nomor NTPN 338143CIF1DDDAPH.

e. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban Inspektorat 2021

Dalam laporan ikhtisar Laporan Pengawasan Inspektorat Utama Bawaslu atas pertanggungjawaban di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kota Semarang Sejumlah Rp40.448.998. atas catatan tersebut Bawaslu Provinsi telah melakukan pengembalian

f. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban Inspektorat TAYL

Dalam laporan ikhtisar Laporan Pengawasan Inspektorat Utama Bawaslu atas pertanggungjawaban di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota 186.393.350 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74
Rincian Tindak Lanjut TAYL

No.	Akun	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
1	425912	Pengembalian Belanja Tahun Yang Lalu atas Catatan Inspektorat	15/02/2023	91EB76U8EKU0S2BJ	2.819.250
2	425912	Pengembalian Belanja Tahun Yang Lalu atas Catatan Inspektorat	16/02/2023	9D7997QLUFGEBHTM	658.500
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Bawaslu Prov Jateng Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor	27/02/2023	A36748N03EA35A01D	4.220.600
4	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	09/10/2023	D4AA26U8ELM4RU39	5.415.000
5	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	10/10/2023	CD9258N3EAQTQJS5	2.707.500
6	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	16/10/2023	ABC4E61QUR3TUDS8	8.122.500
7	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	20/10/2023	A372A3CIFBC42867	5.415.000
8	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	24/10/2023	262B748VV5V6790S	5.415.000
9	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	25/10/2023	D344E1JNFM7VQHTJ	5.415.000
10	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	25/10/2023	B9CEF7QLUG8MMOAI	8.122.500
11	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	26/10/2023	EBC0861QUR3V15KQ	8.122.500
12	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	30/10/2023	03C2E6U8ELMBFFLH	5.415.000
13	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	30/10/2023	916673CIFBCPRMPH	8.122.500

No.	Akun	Keterangan	Tanggal Bayar	NTPN	Nominal Tarif
14	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	30/10/2023	55A7D0N9VRLDVKRC	5.415.000
15	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	DD56461QUR633LP5	8.122.500
16	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	00F0F48VV5UO4BLG	10.830.000
17	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	532B76U8ELMBE7L7	2.707.500
18	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	6C3427QLUG8NR59A	2.707.500
19	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	BCAF38N3EAU02ARB	5.415.000
20	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	B94088N3EAQEGEHR	2.707.500
21	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	7EAAA7QLUG8NREAM	2.707.500
22	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	D97CB3CIFBFE2SIR	5.122.500
23	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	31/10/2023	045CF48VV5V527NG	8.122.500
24	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	01/11/2023	F54D00N9VRLJEGJE	5.415.000
25	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	01/11/2023	A57BE1JNFM8109V3	3.000.000
26	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	01/11/2023	E49EC0N9VRLKJ7BK	8.122.500
27	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	02/11/2023	9B84F8N3EAT8ANSR	5.415.000
28	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	03/11/2023	C086A55DF0HHEIIB	16.245.000
29	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	03/11/2023	A807B48VV5UHKMGG	8.122.500
30	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	23/11/2023	5EC1E48VV5V0SU60	8.122.500
31	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA 2022 Atas Belanja Honorarium Gakkumdu	04/12/2023	6276D3CIFBCPQFBM	8.122.500
Jumlah					186.393.350

- g. Tindak Lanjut Hasil Reviu Pertanggungjawaban BPK TAYL
 Dalam laporan ikhtisar Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2022 atas pertanggungjawaban di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota Rp165.871.342.00.

Tabel 75
Rincian Tindak Lanjut Hasil Reviu BPK TAYL

No	Uraian	Kode Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	28A4B55DEVPJMABJ	27-FEB-23	3.771.342
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	053AA48VV578A61K	28-FEB-23	780.000
3	Belanja Perjalanan	425912	364B02G4VG2FHM8M	28-FEB-23	3.840.000

No	Uraian	Kode Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
	Dinas Biasa				
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	1A5CA6U8EKUDH6BD	28-FEB-23	1.920.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	02F323CIFAKRTC07	28-FEB-23	1.275.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	5B01D48VV578B4IQ	28-FEB-23	3.840.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	BBFB148VV578B5P8	28-FEB-23	3.840.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	236586U8EKUDIAFL	28-FEB-23	3.840.000
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	AE1CE8N3EA5C3JIN	01-MAR-23	3.840.000
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	10D857QLUFIVMM98	01-MAR-23	3.840.000
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	ADCA348VV578BBJG	01-MAR-23	3.840.000
12	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	FBF728N3EA5C3PIJ	01-MAR-23	2.880.000
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	E708B55DEVPKN9UL	01-MAR-23	3.840.000
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	12ABF61QUQC1501I	01-MAR-23	3.840.000
15	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	ED6E83CIFAN1LTRJ	01-MAR-23	3.840.000
16	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	094251JNFLI8R05H	01-MAR-23	3.840.000
17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	532506U8EL0JB7TV	01-MAR-23	3.840.000
18	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	F27182G4VG2FG90I	01-MAR-23	600.000
19	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	C3E143CIFAKRT8PN	01-MAR-23	1.365.000
20	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	9AC3E1JNFLI8R0NB	01-MAR-23	3.840.000
21	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	7A0ED0N9VQVSKQO Q	02-MAR-23	3.840.000
22	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	DE1291JNFLI8VRQF	02-MAR-23	3.840.000
23	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	286346U8EKUDIFKB	02-MAR-23	3.840.000
24	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	53B3E6U8EL0JEGAJ	02-MAR-23	3.840.000
25	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	10BE07QLUFIVQ93A	02-MAR-23	3.360.000
26	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	AFE7B7QLUFIVMK7U	02-MAR-23	2.880.000
27	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	C4D0261QUQE70RDG	02-MAR-23	3.840.000
28	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	DDEBB6U8EL0JD7AD	02-MAR-23	3.840.000
29	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	00C8D3CIFAN1PQ1B	02-MAR-23	3.840.000
30	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	7F4163CIFAN1RUM7	02-MAR-23	3.840.000
31	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	8D7033CIFAN1P8NT	03-MAR-23	3.840.000
32	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	4011F61QUQE84H2K	03-MAR-23	2.880.000
33	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	E13A155DEVQRQJPK9	03-MAR-23	3.840.000

No	Uraian	Kode Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
34	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	D972961QUQC1584U	03-MAR-23	3.840.000
35	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	B659F0N9VQVTLCH2	03-MAR-23	3.840.000
36	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	949FA7QLUFJ106NS	06-MAR-23	3.840.000
37	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	2E0D53CIFAN5VDQB	06-MAR-23	3.840.000
38	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	E4AE77QLUFJ0THNS	06-MAR-23	3.840.000
39	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	243B90N9VQVSEQT4	06-MAR-23	3.840.000
40	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	78CAD6U8EL0OLRPT	07-MAR-23	2.880.000
41	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	9217555DEVVRVSRSD	07-MAR-23	26.520.000
42	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425912	E11152G4VG4QLV18	07-MAR-23	3.400.000
Jumlah					165.871.342

F.5 Kesimpulan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Berdasarkan Nomor PMK 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penilaian PIPK dengan hasil Efektif. Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah Efektif. Laporan hasil PIPK Terlampir.

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 19

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Februari 2024, pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah **Efektif**.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah memadai.

Semarang, 19 Februari 2024

Kepala Sekretariat



Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (115) BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-115.01.2.686328/2023

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (03.51) JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG KPPN : (026) Semarang I

Satuan Kerja : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 206.550.766.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 11264/SSP/686328/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	100.346.933.994,00	239.495.653.049,00	133.291.821.043,00	206.550.766.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	97.950.864.559,00	149.400.827.309,00	40.801.229.868,00	206.550.462.000,00
	2. BP UM (Voucher)	300.000.000,00	989.323.105,00	1.289.323.105,00	0,00
	3. BP BPP	2.096.069.435,00	89.105.502.635,00	91.201.268.070,00	304.000,00
B	BP Selain Kas	100.346.933.994,00	201.001.193.347,00	94.797.361.341,00	206.550.766.000,00
	1. BP UP*)	1.019.529.295,00	1.686.482.498,00	2.706.011.793,00	0,00
	2. BP TUP*)	664.873.763,00	32.000.000.000,00	32.664.873.763,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	87.672.788,00	1.426.176.013,00	1.513.848.801,00	0,00
	5. BP Hibah	97.509.702.600,00	109.040.759.400,00	0,00	206.550.462.000,00
	6. BP Lain-lain	1.065.155.548,00	56.847.775.436,00	57.912.626.984,00	304.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	206.550.462.000,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	206.550.462.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	206.550.462.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	206.550.462.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	206.550.766.000,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	206.550.766.000,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

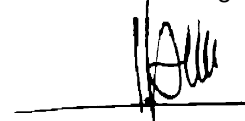
1. -
2. -

Mengetahui
Korwil Pengguna Anggaran

Kartika Handra Lestari
NIP 196804211995012001

KOTA SEMARANG, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran


SRIYADI

NIP 196705281989031007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH 686328

Tgl Data : 12/05/24 12:29 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 3:03 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	379,385,331	379,385,331	0	0	61,448,997	61,448,997	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	379,385,331	379,385,331	0	0	61,448,997	61,448,997	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	379,385,331	379,385,331	0	0	61,448,997	61,448,997	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	619,090,296,000	487,884,486,533	(131,205,809,467)	79	161,695,492,000	126,958,476,438	(34,737,015,562)	79
1. Belanja Pegawai	35,742,514,000	32,306,953,829	(3,435,560,171)	90	32,980,947,000	30,673,264,345	(2,307,682,655)	93
2. Belanja Barang	575,128,974,000	448,079,762,264	(127,049,211,736)	78	127,497,095,000	95,077,477,279	(32,419,617,721)	75
3. Belanja Modal	8,218,808,000	7,497,770,440	(721,037,560)	91	1,217,450,000	1,207,734,814	(9,715,186)	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH 686328

Tgl Data : 12/05/24 12:29 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 3:03 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	619,090,296,000	487,884,486,533	(131,205,809,467)	79	161,695,492,000	126,958,476,438	(34,737,015,562)	79
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Semarang, 12 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa

Kartini Tjandra Lestari
196804211995012001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 3:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	206,550,766,000	0	206,550,766,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	995,047,499	891,692,499	103,355,000	11.59
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	165,871,342	(165,871,342)	(100.00)
Persediaan	21,135,500	33,207,000	(12,071,500)	(36.35)
JUMLAH ASET LANCAR	207,566,948,999	1,090,770,841	206,476,178,158	18,929.38
ASET TETAP				
Tanah	5,132,877,000	0	5,132,877,000	0.00
Peralatan dan Mesin	33,273,715,923	26,721,993,642	6,551,722,281	24.52
Gedung dan Bangunan	1,531,806,000	0	1,531,806,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(26,221,753,688)	(22,643,340,287)	(3,578,413,401)	15.80
JUMLAH ASET TETAP	13,716,645,235	4,078,653,355	9,637,991,880	236.30
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	993,406,561	950,246,891	43,159,670	4.54
Aset Lain-lain	0	560,981,010	(560,981,010)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(940,756,250)	(1,355,208,720)	414,452,470	(30.58)
JUMLAH ASET LAINNYA	52,650,311	156,019,181	(103,368,870)	(66.25)
JUMLAH ASET	221,336,244,545	5,325,443,377	216,010,801,168	4,056.20
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	162,527,068	109,592,912	52,934,156	48.30
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	162,527,068	109,592,912	52,934,156	48.30
JUMLAH KEWAJIBAN	162,527,068	109,592,912	52,934,156	48.30
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	221,173,717,477	5,215,850,465	215,957,867,012	4,140.42
JUMLAH EKUITAS	221,173,717,477	5,215,850,465	215,957,867,012	4,140.42
JUMLAH EKUITAS	221,173,717,477	5,215,850,465	215,957,867,012	4,140.42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	221,336,244,545	5,325,443,377	216,010,801,168	4,056.20

Keterangan :

FINAL

Semarang, 12 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa

Kartini Tjandra Lestari
196804211995012001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Tgl Data : 12/05/24 12:29 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 3:00 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	22,140,639	5,000,000	17,140,639	342.813
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	22,140,639	5,000,000	17,140,639	342.813
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	22,140,639	5,000,000	17,140,639	342.813
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	32,306,953,829	30,668,755,551	1,638,198,278	5.342
Beban Persediaan	38,889,500	47,944,617	(9,055,117)	(18.887)
Beban Barang dan Jasa	353,648,042,050	62,972,829,789	290,675,212,261	461.588
Beban Pemeliharaan	3,939,695,620	3,030,366,079	909,329,541	30.007
Beban Perjalanan Dinas	90,414,481,750	28,492,684,425	61,921,797,325	217.325
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Tgl Data : 12/05/24 12:29 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 3:00 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,669,358,735	3,883,442,314	(214,083,579)	(5.513)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	484,017,421,484	129,096,022,775	354,921,398,709	274.928
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(483,995,280,845)	(129,091,022,775)	(354,904,258,070)	274.926
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(180,275,000)	20,999,999	(201,274,999)	(958.45 2)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	20,999,999	(20,999,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	180,275,000	0	180,275,000	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	196,373,350	35,448,998	160,924,352	453.96
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	196,373,350	35,448,998	160,924,352	453.96
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	16,098,350	56,448,997	(40,350,647)	(71.482)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(483,979,182,495)	(129,034,573,778)	(354,944,608,717)	275.077
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(483,979,182,495)	(129,034,573,778)	(354,944,608,717)	275.077

Keterangan :
FINAL

Semarang, 12 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa

Kartini Tjandra Lestari
196804211995012001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 3:01 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,215,850,465	7,328,721,802	(2,112,871,337)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(483,979,182,495)	(129,034,573,778)	(354,944,608,717)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,560,770)	24,675,000	(27,235,770)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	24,675,000	(24,675,000)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2,560,770)	0	(2,560,770)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	699,939,610,277	126,897,027,441	573,042,582,836	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	215,957,867,012	(2,112,871,337)	218,070,738,349	-
EKUITAS AKHIR	221,173,717,477	5,215,850,465	215,957,867,012	-

Keterangan :

FINAL

Semarang, 12 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa

Kartini Tjandra Lestari

196804211995012001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 3:03 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	487,884,486,533
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	379,385,331	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	12,190,639
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,780,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	353,464,692
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	9,950,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,183,010,960	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,839	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	152,929,002	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32,267,298	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	182,800,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	74,799,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	168,304,103	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	128,110,980	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	350,444,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	93,685,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	26,180,638,550	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	179,638,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,196	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,726,480	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,168,848	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28,600,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,849,120	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	39,600,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	21,944,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,310,329,622	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	170,266,177	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27,804,129,021	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,006,101	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,655,394,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	457,995,450	0
3.0	521211	Belanja Bahan	58,234,476,284	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	225,487,530,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,372,498,456	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26,818,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,265,826,366	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	65,607,299	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	227,233,898	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 3:03 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	47,341,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	34,818,854,489	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,719,100,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,563,371,700	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,902,613,841	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13,375,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,410,344,639	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,476,686,784	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,259,838,600	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,842,524,142	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,484,921,494	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,272,265,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	225,505,440	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	986
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,080,000
3.1	511332	Pengembalian Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	10,115,760
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	713,464,077
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,257,400,826
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	281,200,000
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	622,668,940
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	28,329,285
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	69,947,542
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	1,063,312,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,125,000
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	150,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	386,637,860
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,460,695,070
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	188,794,200
JUMLAH			496,349,793,410	496,349,793,410

Keterangan :

FINAL

Semarang, 12 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa

Kartini Tjandra Lestari

196804211995012001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Tgl Data : 12/05/24 12:29 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 3:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	304,000	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	206,550,462,000	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	995,047,499	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	21,135,500	0
0.0	131111	Tanah	5,132,877,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	33,273,715,923	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,531,806,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	25,345,204,633
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	876,549,055
0.0	162151	Software	989,746,891	0
0.0	162161	Lisensi	3,659,670	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	940,573,266
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	182,984
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	162,527,068
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	487,884,486,533
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	379,385,331	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	5,884,047,075
0.0	391111	Ekuitas	0	5,215,850,465
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	2,560,770	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	206,550,462,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	12,190,639
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,780,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	187,593,350
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	9,950,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	5,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,183,010,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	36,853	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	152,929,002	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32,267,298	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	181,720,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	74,799,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	168,304,103	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	128,110,980	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	350,444,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	93,685,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	26,170,522,790	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	179,638,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,196	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (686328) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Tgl Data : 12/05/24 12:29 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 3:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,726,480	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,168,848	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28,600,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	9,849,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	39,600,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	21,944,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,310,329,622	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	170,266,177	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	27,050,222,052	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,006,101	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,655,394,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	457,995,450	0
3.0	521211	Beban Bahan	55,976,771,458	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	225,299,430,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,372,498,456	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,644,611,120	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	37,297,495	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	156,090,229	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	47,341,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	33,652,187,489	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,716,975,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,563,221,700	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,515,975,981	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	13,375,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,410,344,639	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	24,476,686,784	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,799,143,530	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,653,729,942	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,484,921,494	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,429,277,065	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61,413,130	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	140,265,746	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	182,984	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	38,219,810	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	38,889,500	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	180,275,000	0
JUMLAH			733,078,397,068	733,078,397,068

Keterangan :
FINAL

Semarang, 12 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa

Kartini Tjandra Lestari
196804211995012001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl.Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 13/05/24 12:55 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	21,135,500
131111	Tanah	5,132,877,000
132111	Peralatan dan Mesin	33,273,715,923
133111	Gedung dan Bangunan	1,531,806,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25,345,204,633)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(876,549,055)
162151	Software	989,746,891
162161	Lisensi	3,659,670
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(940,573,266)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(182,984)
J U M L A H		13,790,431,046

SEMARANG, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat

Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M
196804211995012001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:55 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		1,472	582,949,500	0	0	2	670,000	1,470	582,279,500
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	1,050	351,750,000	0	0	2	670,000	1,048	351,080,000
3050201004	Kursi Kayu	-	2	1,300,000	0	0	0	0	2	1,300,000
3050206005	Amplifier	-	2	259,200	0	0	0	0	2	259,200
3050206013	Megaphone	-	2	1,000,000	0	0	0	0	2	1,000,000
3050206019	Stabilisator	-	2	1,002,150	0	0	0	0	2	1,002,150
3050206056	Karpet	-	3	1,800,000	0	0	0	0	3	1,800,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	-	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3060101002	Audio Mixing Portable	-	1	476,900	0	0	0	0	1	476,900
3060101003	Audio Mixing Stationer	-	2	1,800,000	0	0	0	0	2	1,800,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	-	3	2,398,400	0	0	0	0	3	2,398,400
3060101037	Microphone/Boom Stand	-	2	879,600	0	0	0	0	2	879,600
3060101088	Voice Recorder	-	2	1,500,000	0	0	0	0	2	1,500,000
3060102022	Video Caption Adder	-	1	352,300	0	0	0	0	1	352,300
3060102045	Tripod Camera	-	3	941,950	0	0	0	0	3	941,950
3060102118	Head Set	-	5	1,725,000	0	0	0	0	5	1,725,000
3060102130	Lampu Blitz Kamera	-	1	850,000	0	0	0	0	1	850,000
3060102131	Lensa Filter	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
3060102159	Clipp On	-	3	1,270,700	0	0	0	0	3	1,270,700
3060201020	Telepon Digital	-	20	9,990,000	0	0	0	0	20	9,990,000
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	-	346	190,928,300	0	0	0	0	346	190,928,300
3100201012	Hard Disk	-	1	780,000	0	0	0	0	1	780,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	-	11	8,295,000	0	0	0	0	11	8,295,000
3100204026	Acces Point	-	8	3,200,000	0	0	0	0	8	3,200,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	2	670,000	2	670,000	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	0	0	2	670,000	2	670,000	0	0
TOTAL				582,949,500		670,000		1,340,000		582,279,500

SEMARANG, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat

Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M
196804211995012001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:57 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		0	0	3,155	5,132,877,000	0	0	3,155	5,132,877,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	0	0	1,225	551,250,000	0	0	1,225	551,250,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	0	0	1,930	4,581,627,000	0	0	1,930	4,581,627,000
132111	Peralatan dan Mesin		5,069	26,721,993,642	617	8,667,231,489	287	2,115,509,208	5,399	33,273,715,923
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	35	754,600,000	0	0	0	0	35	754,600,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	12	4,159,398,000	0	0	0	0	12	4,159,398,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	63,106,000	0	0	0	0	4	63,106,000
3020202001	Sepeda	Unit	7	14,000,000	0	0	0	0	7	14,000,000
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	449	1,345,238,800	0	0	0	0	449	1,345,238,800
3050104002	Lemari Kayu	Buah	2	6,250,000	0	0	0	0	2	6,250,000
3050104003	Rak Besi	Buah	18	97,300,000	0	0	0	0	18	97,300,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	75	242,302,000	0	0	0	0	75	242,302,000
3050104007	Brandkas	Buah	35	71,430,000	0	0	0	0	35	71,430,000
3050104020	Lemari Display	Buah	8	58,930,000	0	0	0	0	8	58,930,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	29,417,500	35	435,750,000	0	0	37	465,167,500
3050105010	White Board	Buah	4	5,050,000	0	0	0	0	4	5,050,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	8,600,000	0	0	0	0	4	8,600,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	36	104,876,750	0	0	0	0	36	104,876,750
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	38	216,031,100	36	491,500,000	3	16,502,400	71	691,028,700
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	38	75,239,000	0	0	1	1,750,000	37	73,489,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	690	2,901,836,833	1	8,090,909	6	34,156,818	685	2,875,770,924
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1,248	1,550,911,900	1	1,419,000	20	13,808,300	1,229	1,538,522,600
3050201004	Kursi Kayu	Buah	4	2,000,000	0	0	0	0	4	2,000,000
3050201005	Sice	Buah	36	219,993,500	0	0	0	0	36	219,993,500
3050201008	Meja Rapat	Buah	246	1,260,450,000	0	0	1	4,900,000	245	1,255,550,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	9,150,000	0	0	0	0	1	9,150,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	22	30,800,000	0	0	0	0	22	30,800,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	9,300,000	0	0	0	0	2	9,300,000
3050203002	Mesin Pel/Poles	Buah	2	5,500,000	0	0	0	0	2	5,500,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	4,900,000	0	0	0	0	1	4,900,000
3050204001	Lemari Es	Buah	7	14,049,000	0	0	0	0	7	14,049,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	49,600,000	0	0	0	0	2	49,600,000
3050204004	A.C. Split	Buah	261	1,048,425,500	8	85,540,000	2	8,470,000	267	1,125,495,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:57 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	2	2,800,000	0	0	0	0	2	2,800,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	990,000	0	0	0	0	1	990,000
3050206002	Televisi	Buah	44	271,745,999	0	0	0	0	44	271,745,999
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	13,737,500	0	0	0	0	1	13,737,500
3050206008	Sound System	Buah	36	476,401,750	0	0	0	0	36	476,401,750
3050206013	Megaphone	Buah	1	800,000	0	0	0	0	1	800,000
3050206014	Microphone	Buah	1	2,300,000	0	0	0	0	1	2,300,000
3050206016	Mic Conference	Buah	1	171,750,000	0	0	0	0	1	171,750,000
3050206019	Stabilisator	Buah	1	4,200,000	1	6,700,000	0	0	2	10,900,000
3050206020	Camera Video	Buah	5	36,903,200	0	0	0	0	5	36,903,200
3050206035	Kaca Hias	Buah	4	2,600,000	0	0	0	0	4	2,600,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	3,480,000	0	0	0	0	2	3,480,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	3,930,000	0	0	0	0	1	3,930,000
3050206046	Handy Cam	Buah	70	230,075,000	0	0	5	13,500,000	65	216,575,000
3050206068	DVD Player	Buah	1	12,500,000	0	0	0	0	1	12,500,000
3050206071	Kabel	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	3,950,000	0	0	0	0	1	3,950,000
3060101031	Intercom Unit	Buah	6	7,200,000	0	0	0	0	6	7,200,000
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	2	3,589,632	0	0	0	0	2	3,589,632
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	8	23,817,500	0	0	0	0	8	23,817,500
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	3	1,500,000	0	0	0	0	3	1,500,000
3060101041	Professional Sound System	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	1,150,000	0	0	0	0	1	1,150,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	37	71,925,000	0	0	0	0	37	71,925,000
3060102022	Video Caption Adder	Buah	2	2,400,000	0	0	0	0	2	2,400,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	37	96,200,000	2	2,840,000	0	0	39	99,040,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	7	32,494,400	4	57,700,000	0	0	11	90,194,400
3060102128	Camera Digital	Buah	44	362,980,000	1	56,800,000	0	0	45	419,780,000
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	2	4,000,000	0	0	0	0	2	4,000,000
3060102132	Video Conference	Buah	0	0	1	18,050,000	0	0	1	18,050,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	3	8,897,500	0	0	0	0	3	8,897,500
3060102158	Monopod	Buah	1	1,750,000	0	0	0	0	1	1,750,000
3060102159	Clipp On	Buah	5	28,750,000	2	9,800,000	0	0	7	38,550,000
3060103999	Peralatan Studio Gambar Lainnya	dummy	1	2,006,900	0	0	0	0	1	2,006,900
3060105047	Kamera Udara	Buah	3	31,200,000	0	0	0	0	3	31,200,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	36	264,384,300	0	0	0	0	36	264,384,300
3060201004	Telephone Mobile	Buah	2	11,605,000	0	0	0	0	2	11,605,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:57 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060201010	Facsimile	Buah	3	5,342,500	0	0	0	0	3	5,342,500
3060201015	Telepon Lapangan	Buah	6	20,769,500	0	0	0	0	6	20,769,500
3060201020	Telepon Digital	Buah	243	272,306,100	3	3,270,000	0	0	246	275,576,100
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	34	54,111,600	0	0	0	0	34	54,111,600
3100102001	P.C Unit	Buah	491	5,423,968,500	101	1,012,594,500	134	1,340,669,500	458	5,095,893,500
3100102002	Lap Top	Buah	203	2,421,591,122	270	5,023,464,440	39	442,200,950	434	7,002,854,612
3100102009	Tablet PC	Buah	12	113,988,000	0	0	0	0	12	113,988,000
3100201012	Hard Disk	Buah	0	0	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000
3100203002	Monitor	Buah	0	0	35	84,875,000	0	0	35	84,875,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	332	1,003,680,956	39	146,312,640	75	237,571,240	296	912,422,356
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	42	738,071,200	71	1,155,525,000	0	0	113	1,893,596,200
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	21	54,165,000	4	27,500,000	1	1,980,000	24	79,685,000
3100204001	Server	Buah	1	14,154,000	0	0	0	0	1	14,154,000
3100204002	Router	Buah	1	1,600,000	0	0	0	0	1	1,600,000
3100204015	Firewall	Buah	0	0	1	34,500,000	0	0	1	34,500,000
3100204024	Switch	Buah	4	7,685,000	0	0	0	0	4	7,685,000
3100204026	Acces Point	Buah	4	2,085,600	0	0	0	0	4	2,085,600
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	4	12,625,000	0	0	0	0	4	12,625,000
3190103010	Treadmill	Buah	1	4,400,000	0	0	0	0	1	4,400,000
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	9	1,531,806,000	0	0	9	1,531,806,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	1	1,284,066,000	0	0	1	1,284,066,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	0	0	8	247,740,000	0	0	8	247,740,000
135111	Aset Tetap Renovasi		0	0	2	179,785,000	2	179,785,000	0	0
6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	dummy	0	0	2	179,785,000	2	179,785,000	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		62	560,981,010	287	2,115,509,208	349	2,676,490,218	0	0
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	3,000,000	0	0	1	3,000,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	16,703,100	3	16,502,400	5	33,205,500	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	1	1,750,000	1	1,750,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	6	34,156,818	6	34,156,818	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	20	13,808,300	20	13,808,300	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	1	4,900,000	1	4,900,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	2	10,625,000	2	8,470,000	4	19,095,000	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	990,000	0	0	1	990,000	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	2,700,000	5	13,500,000	6	16,200,000	0	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	962,500	0	0	1	962,500	0	0
3060201020	Telepon Digital	Buah	3	3,270,000	0	0	3	3,270,000	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:57 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100102001	P.C Unit	Buah	23	217,525,000	134	1,340,669,500	157	1,558,194,500	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	19	227,993,950	39	442,200,950	58	670,194,900	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	15,266,460	75	237,571,240	81	252,837,700	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	20,625,000	0	0	1	20,625,000	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	1	1,980,000	1	1,980,000	0	0
3100204026	Acces Point	Buah	1	1,320,000	0	0	1	1,320,000	0	0
TOTAL				27,282,974,652		17,627,208,697		4,971,784,426		39,938,398,923

SEMARANG, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat

Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M
196804211995012001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:56 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		0	0	3,155	5,132,877,000	0	0	3,155	5,132,877,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	0	0	1,225	551,250,000	0	0	1,225	551,250,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	0	0	1,930	4,581,627,000	0	0	1,930	4,581,627,000
132111	Peralatan dan Mesin		6,541	27,304,943,142	617	8,667,231,489	289	2,116,179,208	6,869	33,855,995,423
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	35	754,600,000	0	0	0	0	35	754,600,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	12	4,159,398,000	0	0	0	0	12	4,159,398,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	63,106,000	0	0	0	0	4	63,106,000
3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3020202001	Sepeda	Unit	7	14,000,000	0	0	0	0	7	14,000,000
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	449	1,345,238,800	0	0	0	0	449	1,345,238,800
3050104002	Lemari Kayu	Buah	2	6,250,000	0	0	0	0	2	6,250,000
3050104003	Rak Besi	Buah	18	97,300,000	0	0	0	0	18	97,300,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	75	242,302,000	0	0	0	0	75	242,302,000
3050104007	Brandkas	Buah	35	71,430,000	0	0	0	0	35	71,430,000
3050104020	Lemari Display	Buah	8	58,930,000	0	0	0	0	8	58,930,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	29,417,500	35	435,750,000	0	0	37	465,167,500
3050105010	White Board	Buah	4	5,050,000	0	0	0	0	4	5,050,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	8,600,000	0	0	0	0	4	8,600,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	36	104,876,750	0	0	0	0	36	104,876,750
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	38	216,031,100	36	491,500,000	3	16,502,400	71	691,028,700
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	38	75,239,000	0	0	1	1,750,000	37	73,489,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	690	2,901,836,833	1	8,090,909	6	34,156,818	685	2,875,770,924
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	2,298	1,902,661,900	1	1,419,000	22	14,478,300	2,277	1,889,602,600
3050201004	Kursi Kayu	Buah	6	3,300,000	0	0	0	0	6	3,300,000
3050201005	Sice	Buah	36	219,993,500	0	0	0	0	36	219,993,500
3050201008	Meja Rapat	Buah	246	1,260,450,000	0	0	1	4,900,000	245	1,255,550,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	9,150,000	0	0	0	0	1	9,150,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	22	30,800,000	0	0	0	0	22	30,800,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	9,300,000	0	0	0	0	2	9,300,000
3050203002	Mesin Pel/Poles	Buah	2	5,500,000	0	0	0	0	2	5,500,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	4,900,000	0	0	0	0	1	4,900,000
3050204001	Lemari Es	Buah	7	14,049,000	0	0	0	0	7	14,049,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:56 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204002	A.C. Sentral	Buah	2	49,600,000	0	0	0	0	2	49,600,000
3050204004	A.C. Split	Buah	261	1,048,425,500	8	85,540,000	2	8,470,000	267	1,125,495,500
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	2	2,800,000	0	0	0	0	2	2,800,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	990,000	0	0	0	0	1	990,000
3050206002	Televisi	Buah	44	271,745,999	0	0	0	0	44	271,745,999
3050206005	Amplifier	Buah	2	259,200	0	0	0	0	2	259,200
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	13,737,500	0	0	0	0	1	13,737,500
3050206008	Sound System	Buah	36	476,401,750	0	0	0	0	36	476,401,750
3050206013	Megaphone	Buah	3	1,800,000	0	0	0	0	3	1,800,000
3050206014	Microphone	Buah	1	2,300,000	0	0	0	0	1	2,300,000
3050206016	Mic Conference	Buah	1	171,750,000	0	0	0	0	1	171,750,000
3050206019	Stabilisator	Buah	3	5,202,150	1	6,700,000	0	0	4	11,902,150
3050206020	Camera Video	Buah	5	36,903,200	0	0	0	0	5	36,903,200
3050206035	Kaca Hias	Buah	4	2,600,000	0	0	0	0	4	2,600,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	3,480,000	0	0	0	0	2	3,480,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	3,930,000	0	0	0	0	1	3,930,000
3050206046	Handy Cam	Buah	70	230,075,000	0	0	5	13,500,000	65	216,575,000
3050206056	Karpet	Buah	3	1,800,000	0	0	0	0	3	1,800,000
3050206068	DVD Player	Buah	1	12,500,000	0	0	0	0	1	12,500,000
3050206071	Kabel	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	2	4,426,900	0	0	0	0	2	4,426,900
3060101003	Audio Mixing Stationer	Buah	2	1,800,000	0	0	0	0	2	1,800,000
3060101031	Intercom Unit	Buah	6	7,200,000	0	0	0	0	6	7,200,000
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	2	3,589,632	0	0	0	0	2	3,589,632
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	11	26,215,900	0	0	0	0	11	26,215,900
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	5	2,379,600	0	0	0	0	5	2,379,600
3060101041	Professional Sound System	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	1,150,000	0	0	0	0	1	1,150,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	39	73,425,000	0	0	0	0	39	73,425,000
3060102022	Video Caption Adder	Buah	3	2,752,300	0	0	0	0	3	2,752,300
3060102045	Tripod Camera	Buah	40	97,141,950	2	2,840,000	0	0	42	99,981,950
3060102061	Lensa Kamera	Buah	7	32,494,400	4	57,700,000	0	0	11	90,194,400
3060102118	Head Set	Buah	5	1,725,000	0	0	0	0	5	1,725,000
3060102128	Camera Digital	Buah	44	362,980,000	1	56,800,000	0	0	45	419,780,000
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	3	4,850,000	0	0	0	0	3	4,850,000
3060102131	Lensa Filter	Buah	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:56 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:56 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102132	Video Conference	Buah	0	0	1	18,050,000	0	0	1	18,050,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	3	8,897,500	0	0	0	0	3	8,897,500
3060102158	Monopod	Buah	1	1,750,000	0	0	0	0	1	1,750,000
3060102159	Clipp On	Buah	8	30,020,700	2	9,800,000	0	0	10	39,820,700
3060103999	Peralatan Studio Gambar Lainnya	dummy	1	2,006,900	0	0	0	0	1	2,006,900
3060105047	Kamera Udara	Buah	3	31,200,000	0	0	0	0	3	31,200,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	36	264,384,300	0	0	0	0	36	264,384,300
3060201004	Telephone Mobile	Buah	2	11,605,000	0	0	0	0	2	11,605,000
3060201010	Facsimile	Buah	3	5,342,500	0	0	0	0	3	5,342,500
3060201015	Telepon Lapangan	Buah	6	20,769,500	0	0	0	0	6	20,769,500
3060201020	Telepon Digital	Buah	263	282,296,100	3	3,270,000	0	0	266	285,566,100
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3060345001	Scanner Facsimile	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	380	245,039,900	0	0	0	0	380	245,039,900
3090404007	Digital Handycam VHSC	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	491	5,423,968,500	101	1,012,594,500	134	1,340,669,500	458	5,095,893,500
3100102002	Lap Top	Buah	203	2,421,591,122	270	5,023,464,440	39	442,200,950	434	7,002,854,612
3100102009	Tablet PC	Buah	12	113,988,000	0	0	0	0	12	113,988,000
3100201012	Hard Disk	Buah	1	780,000	1	5,000,000	0	0	2	5,780,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203002	Monitor	Buah	0	0	35	84,875,000	0	0	35	84,875,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	332	1,003,680,956	39	146,312,640	75	237,571,240	296	912,422,356
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	42	738,071,200	71	1,155,525,000	0	0	113	1,893,596,200
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	32	62,460,000	4	27,500,000	1	1,980,000	35	87,980,000
3100204001	Server	Buah	1	14,154,000	0	0	0	0	1	14,154,000
3100204002	Router	Buah	1	1,600,000	0	0	0	0	1	1,600,000
3100204015	Firewall	Buah	0	0	1	34,500,000	0	0	1	34,500,000
3100204021	Kabel UTP	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204024	Switch	Buah	4	7,685,000	0	0	0	0	4	7,685,000
3100204026	Acces Point	Buah	12	5,285,600	0	0	0	0	12	5,285,600
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3190102001	Alat Tenis Meja	Buah	4	12,625,000	0	0	0	0	4	12,625,000
3190103010	Treadmill	Buah	1	4,400,000	0	0	0	0	1	4,400,000
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	9	1,531,806,000	0	0	9	1,531,806,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	0	0	1	1,284,066,000	0	0	1	1,284,066,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	0	0	8	247,740,000	0	0	8	247,740,000
134113	Jaringan		0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 686328 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 12:56 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5031001999	Instalasi Lain-lain	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi		0	0	2	179,785,000	2	179,785,000	0	0
6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	dummy	0	0	2	179,785,000	2	179,785,000	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		62	560,981,010	289	2,116,179,208	351	2,677,160,218	0	0
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	3,000,000	0	0	1	3,000,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	16,703,100	3	16,502,400	5	33,205,500	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	1	1,750,000	1	1,750,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	6	34,156,818	6	34,156,818	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	22	14,478,300	22	14,478,300	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	1	4,900,000	1	4,900,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	2	10,625,000	2	8,470,000	4	19,095,000	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	990,000	0	0	1	990,000	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	2,700,000	5	13,500,000	6	16,200,000	0	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	962,500	0	0	1	962,500	0	0
3060201020	Telepon Digital	Buah	3	3,270,000	0	0	3	3,270,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	23	217,525,000	134	1,340,669,500	157	1,558,194,500	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	19	227,993,950	39	442,200,950	58	670,194,900	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	15,266,460	75	237,571,240	81	252,837,700	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	20,625,000	0	0	1	20,625,000	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	1	1,980,000	1	1,980,000	0	0
3100204026	Acces Point	Buah	1	1,320,000	0	0	1	1,320,000	0	0
TOTAL				27,865,924,152		17,627,878,697		4,973,124,426		40,520,678,423

SEMARANG, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat

Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M
196804211995012001